

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
TAHUN 2006-2013**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



Oleh:
Rodhiah Umaroh
(11404241016)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
TAHUN 2006-2013**



Disusun Oleh:
Rodhiah Umaroh
(11404241016)

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di
depan Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Dosen Pembimbing,



Daru Wahyuni, M.Si.

NIP. 19681109 199903 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
TAHUN 2006-2013

Disusun Oleh:

Rodhiah Umaroh

(11404241016)

Telah dipertahankan di depan tim penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2015 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Supriyanto, M.M	Ketua Penguji		22 Juni 2015
Daru Wahyuni, M.Si.	Sekretaris Penguji		22 Juni 2015
Losina Purnastuti, Ph. D.	Penguji Utama		19 Juni 2015

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 0024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodhiah Umaroh

NIM : 11404241016

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan

Pendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2006-2013

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.



Yogyakarta, 3 Juni 2015

Yang Menyatakan,

Rodhiah Umaroh

NIM. 11404241016

MOTTO

“Remember Me, I will remember you”
Al-Baqarah (2: 152)

“aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku. Karena aku tidak tahu
mana diantara keduanya yang lebih baik untukku”
Ummar Bin Khatab

“what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine,
you create.”
Buddha

“what’s the point in being clever if you can’t prove it?”
Sherlock Holmes

“integrity is doing the right things, even when no one is whatching”
C.S. Lewis

“Great things never come from comfort zone”
Penulis

Persembahan

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

Kedua Adikku

Mafthulatul Kirom dan Nasihatul Khoiriyah;

“Tumbuhlah! jadilah kebanggan!”

Untuk kedua orang tuaku

Ibu Maesaroh dan Bapak Basuki

“God, please grant my parents strength, health and happiness. Please make a light in their life, make me a source of laughter and smile, just as they have for me. Guide them to the straight path, and keep them away from worries and grief.”

serta kakakku

Rohaminah Asihatun;

“You are the reason. Without you, I would never been here”

Seluruh Pencari Ilmu pengetahuan di dunia;

“carilah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat”

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
TAHUN 2006-2013**

Oleh:

Rodhiah Umaroh

11404241016

ABSTRAK

Secara umum pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi di 33 Provinsi dalam kurun waktu selama 8 tahun (2006-2013).

Penelitian ini termasuk dalam jenis *ex post facto* dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder meliputi data angka partisipasi murni, rata-rata biaya pendidikan, PDRB per Kapita, tingkat pengangguran universitas, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data panel dengan model regresi *fixed effect*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat variabel yaitu tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia sedangkan variabel biaya pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa elastisitas harga komoditas pendidikan tinggi memiliki jenis inelastis dengan nilai koefisien sebesar -0,51 dan dilihat dari jenis elastisitas pendapatan, pendidikan tinggi termasuk dalam golongan barang superior ditunjukkan dengan koefisien elastisitas pendapatan sebesar 11,57.

Kata kunci: faktor yang mempengaruhi, permintaan pendidikan tinggi

**AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HIGHER EDUCATION
DEMANDS IN INDONESIA IN 2006-2013**

By:

RodhiahUmaroh

11404241016

ABSTRACT

In general, education is one of the indicators to measure the advancement level of a nation. This study aimed to investigate factors affecting higher education demands in 33 provinces in a period of eight years (2006-2013).

This was an ex post facto study employing the quantitative method. The data were secondary data comprising those on the net enrolment rate, average education cost, Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, university unemployment rate, number of university level workers, and secondary school graduation rate issued by the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Education and Culture. The analysis technique was the panel data analysis using the fixed effect regression model.

The results of the study showed that four variables, namely the unemployment rate, people's incomes, number of university level workers, secondary school graduation rate had significant positive effects on higher education demands in Indonesia, while the tuition fees variable is insignificant. The results of the study also indicated that the elasticity of the price of higher education commodity was of inelastic type with a coefficient of -0.51 and in terms of the type of income elasticity, higher education belonged to superior goods indicated by an income elasticity coefficient of 11.57.

Keyword: determinants, demand for higher education

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi saya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2006-2013” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Namun begitu banyak pihak yang memberikan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam menulis skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis menggunakan fasilitas selama kuliah sampai penyusunan skripsi ini selesai.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah mengizinkan dan telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Daru Wahyuni, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ali Muhson, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasihat selama masa perkuliahan.
5. Ibu Losina Purnastuti, M. Ec. Dev., Ph.D. selaku narasumber dan penguji utama yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Supriyanto, M.M. selaku ketua penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk meguji skripsi yang telah dibuat.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah ikhlas memberikan ilmu yang sangat berharga.
8. Pak Dating selaku admin jurusan Pendidikan Ekonomi atas segala bantuannya terkait masalah administratif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak Basuki dan Ibu Maesaroh yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan doanya selama ini .
10. Kepada sahabatku Magfiroh dan Putri Wulandari, *my roommates* yang selama ini menjadi tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan.
11. Teman-teman Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2011 yang telah memberikan segudang pengalaman dan kenangan, bersama kalian adalah salah satu takdir terindah yang diberikan Tuhan.
12. Teman-teman selama berorganisasi HMPE 2012, HMPE 2013, KRISTAL 2012 dan FOMUNY 2013 tetaplah teguh dalam jalan karya kalian.
13. Bapak Dr. Doddy Ariefianto yang telah sudi membalas email penulis dalam melakukan konsultasi data.
14. Badan Pusat Statistik Indonesia, yang telah membukakan pintu lebar pada penulis untuk menggunakan data-nya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih. *Thank You.*
Merci Beaucoup. Matur Nuwun.

Yogyakarta, 3 Jun 2015

Penulis

Rodhiah Umaroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Permintaan Pendidikan.....	12
a. Pengertian Permintaan	12
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pendidikan	12
c. Cara Mengukur Permintaan Pendidikan Tinggi.....	17
2. Pendidikan Tinggi	18

a.	Pengertian Pendidikan Tinggi	18
b.	Fungsi Pendidikan Tinggi	19
c.	Manfaat Pendidikan Tinggi	20
3.	Angka Partisipasi Pendidikan	22
4.	Biaya Pendidikan	24
5.	Pendapatan Masyarakat	28
6.	Pengangguran	30
a.	Pengertian Pengangguran	30
b.	Jenis-jenis Pengangguran	30
c.	Cara Mengukur Pengangguran	32
7.	Tenaga Kerja	33
8.	Tingkat Lulusan Sekolah Menengah	35
9.	Elastisitas	36
a.	Elastisitas Harga (<i>Price elasticity of demand</i>)	36
b.	Elastisitas Pendapatan (<i>Income elasticity of demand</i>)	36
c.	Elastisitas Silang (<i>Cross elasticity of demand</i>)	37
B.	Penelitian yang Relevan	37
C.	Kerangka Berfikir	41
D.	Hipotesis	44
BAB III	METODE PENELITIAN	46
A.	Desain Penelitian	46
B.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	46
C.	Data dan Sumber Data	48
D.	Teknik Analisis Data	49
1.	Alat Analisis Regresi Data Panel	49
2.	Model Analisis Regresi Data Panel	50
3.	Teknik Estimasi Regresi pada Data Panel dengan Uji Hausman ...	51
4.	Uji Asumsi Klasik	52
a.	Uji Normalitas	52
b.	Uji Multikolinieritas	53

c. Uji Heteroskedastisitas.....	53
5. Uji Statistik	54
a. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)	54
b. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t).....	55
c. Koefisien Determinasi (R^2)	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Data	57
1. Permintaan Pendidikan Tinggi.....	59
2. Biaya Pendidikan	60
3. Pendapatan Masyarakat.....	61
4. Tingkat Pengangguran	62
5. Pekerja Tingkat Universitas	63
6. Tingkat Lulusan Sekolah Menengah.....	63
B. Hasil Penelitian	63
1. Teknik Estimasi Data Panel	63
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	67
a. Uji Normalitas.....	67
b. Uji Multikolinieritas.....	69
c. Uji Heteroskedastisitas.....	70
3. Pengujian Koefisien Regresi	71
a. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	71
b. Pengujian Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)	72
4. Koefisien Determinasi (R^2).....	72
C. Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasinya	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi Kebijakan.....	81
C. Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24 Tahun.....	1
2. Perkembangan Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah ke Jenjang Pendidikan Tinggi	3
3. Tingkat Pengangguran di Indonesia menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan	4
4. Tingkat Pengangguran Indonesia dan Negara Lain di ASEAN.....	5
5. Perbandingan Biaya Kuliah di Indonesia dengan Singapura dan Malaysia tahun 2011	7
6. Statistik Deskriptif Data Penelitian	57
7. Hasil Uji Likelihood Ratio	65
8. Hasil Uji Hausman	66
9. Hasil Regresi Data Panel.....	69
10. Hasil Uji Multikolinieritas Korelasi Bivariat.....	70
11. Hasil Uji Park.....	70
12. Hasil Regresi Data Panel EGLS.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Expenditure Per Student Tertiary Indonesia (dalam %)	6
2. Jenis-jenis Biaya Pendidikan.....	27
3. Paradigma Penelitian.....	44
4. Perkembangan Tingkat Partisipasi Pendidikan Tinggi	59
5. Perkembangan Biaya Pendidikan Tinggi	60
6. Perkembangan Tingkat Pendapatan Masyarakat (PDRB per Kapita)..	61
7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Universitas	62
8. Perkembangan Pekerja Tingkat Universitas	63
9. Perkembangan Tingkat Lulusan Sekolah Menengah SMA/MA.....	64
10. Hasil Uji Normalitas	67
11. Hasil Uji Normlitas EGLS	69
12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (%)	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian	88
2. Statistik Deskriptif Data Penelitian	99
a. Statistik Deskriptif Permintaan Pendidikan Tinggi (<i>Enroll</i>)	99
b. Statistik Deskriptif Biaya Pendidikan (<i>Tuition</i>).....	99
c. Statistik Deskriptif Pendapatan Masyarakat (<i>Income</i>).....	100
d. Statistik Deskriptif Tingkat Pengangguran (<i>Unemp</i>).....	100
e. Statistik Deskriptif Pekerja Tingkat Universitas (<i>PIW</i>).....	101
f. Statistik Deskriptif Tingkat Lulusan Sekolah Menengah (<i>High Grades</i>)	101
3. Uji Likelihood Ratio.....	102
4. Uji Hausman	103
5. Uji Normalitas	104
6. Uji Normalitas EGLS	104
7. Korelasi Bivariat	105
8. Hasil Uji Park.....	105
9. Hasil Regresi Utama	106
10. Hasil Regresi Utama EGLS	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi menurut UU No. 2 tahun 2012 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. Sektor pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2014, terdapat sekitar 3.510 institusi pendidikan tinggi yang tersebar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa terdaftar sekitar 7.990.394 orang dari jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral. Tingkat partisipasi siswa pada level pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan angka partisipasi sekolah pada usia 19-24 tahun yang terus meningkat di Indonesia. Gambaran mengenai tingkat penyerapan pendidikan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24 Tahun

Tahun	APS 19-24 tahun (dalam %)	Tahun	APS 19-24 tahun (dalam %)
2003	11,71	2009	12,72
2004	12,07	2010	13,77
2005	12,23	2011	14,82
2006	11,38	2012	16,05
2007	13,08	2013	20,14
2008	13,29	2014	23,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Indikator Pendidikan

APS pendidikan tinggi dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa usia 19-24 tahun yang masih mengenyam pendidikan dibagi dengan kelompok usia mahasiswa (19-24 tahun) dimana diasumsikan pada usia 19-24 tahun individu sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Meskipun angka partisipasi sekolah pendidikan tinggi terus meningkat ternyata menurut *world bank*, Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga dalam jumlah tingkat pendaftar pendidikan tinggi dengan tingkat pendaftar kotor hanya sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan sebagian masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendidikan tinggi.

Pendidikan pada umumnya mampu memecahkan permasalahan bangsa khususnya pada negara berkembang yang memiliki berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, meledaknya populasi penduduk dan angka kriminalitas yang tinggi. Pendidikan mampu menciptakan manusia yang lebih berbudaya sehingga mampu mengelola aset negara dengan kecakapan dan pengetahuan serta teknologi yang diperolehnya. Semakin tinggi angka partisipasi pendidikan khususnya tingkat pendidikan tinggi mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki asset manusia yang berkualitas dibanding negara yang tingkat pendidikan tinggi-nya rendah karena pada pendidikan tinggi mahasiswa memperoleh pengetahuan yang mendalam di bidangnya masing-masing.

Tingkat penyerapan permintaan pada pendidikan tinggi dipengaruhi oleh minat siswa sekolah menengah atas baik umum/kejuruan dimana

jenjang sekolah menengah atas ini berada di bawah dari jenjang pendidikan tinggi. Menurut data dari *World Bank* sebagian besar siswa (88 persen) menyatakan keinginan untuk melanjutkan pendidikannya setamat SMA/SMK. Hal ini dikarenakan fenomena mereka yang telah mengenyam pendidikan tinggi mendapatkan upah yang lebih tinggi ketika mereka bekerja karena tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih produktif. Persentase jumlah lulusan siswa sekolah menengah yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah ke Jenjang Pendidikan Tinggi

Tahun Ajaran	Jumlah Lulusan		Angka Melanjutkan Ke Pendidikan Tinggi	
	SMA/MA	SMK	Jumlah	%
2006/2007	1.301.712	641.666	875.695	45,06%
2007/2008	1.311.168	685.982	1.224.098	61,29%
2008/2009	1.342.479	759.912	1.151.879	52,71%
2009/2010	1.499.743	825.222	1.192.646	51,30%
2010/2011	1.450.498	938.049	1.209.082	50,62%
2011/2012	1.274.186	1.086.387	1.142.835	48,41%
2013/2014	1.289.185	1.169.218	1.145.636	46,77%

Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan, Kemdikbud

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam persentase, angka melanjutkan siswa sekolah menengah baik dari sekolah menengah umum atau kejuruan ke pendidikan tinggi mengalami fluktuasi. Pada tahun ajaran 2006/2007 hingga tahun ajaran 2007/2008 mengalami peningkatan namun setelah itu persentase melanjutkan ini semakin menurun tiap tahunnya. Meskipun persentase angka melanjutkan siswa sekolah menengah mengalami penurunan namun dalam hal jumlah angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut, faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan pendidikan tinggi adalah pengangguran. Dengan jumlah pengangguran yang tinggi di suatu negara akan mendorong masyarakatnya untuk menambah ilmu dan keterampilannya supaya mereka bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Saat ini di Indonesia angka pengangguran masih didominasi oleh penganggur dengan tingkat pendidikan SMA. Tabel pengangguran menurut tingkat pendidikan di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Pengangguran di Indonesia menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2010	2011	2012	2013	2014
Tidak/belum pernah sekolah	163.954	205.218	86.397	81.432	134.040
Belum/tidaktamat SD	616.104	748.742	513.875	489.152	610.574
SD	1.387.220	1.233.475	1.447.454	1.347.555	1.374.822
SMP	1.624.666	2.117.407	1.703.326	1.689.643	1.693.203
SMA Umum	2.148.740	2.374.469	1.854.362	1.925.660	1.893.509
SMA Kejuruan	1.188.397	1.157.813	1.058.412	1.258.201	847.365
Universitas	683.064	542.682	443.518	434.185	398.298

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Indikator Tenaga Kerja

Dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, jumlah penganggur dengan tingkat pendidikan SMA umum adalah yang terbesar setiap tahunnya meskipun jumlahnya menurun. Pada tahun 2014 jumlah pengangguran tingkat SMA umum sebesar 1.893.509 jiwa atau 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah penganggur tingkat SMA kejuruan dan 4,7 kali lebih banyak dari pengangguran di tingkat universitas. Saat ini, angka

pengangguran di Indonesia juga relatif lebih tinggi dibanding dengan negara lain dikawasan Asean.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Indonesia dan Negara Lain di ASEAN

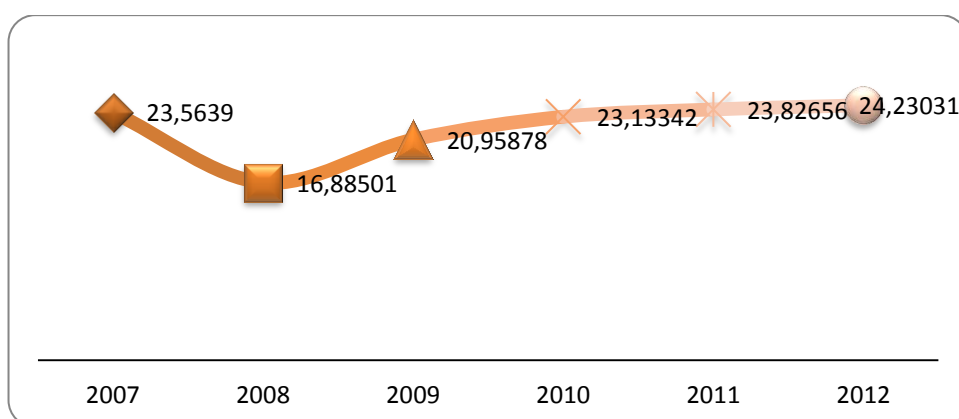
Negara	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Filipina	7,8	7,8	8,1	7,4	7,5	7,3	7,0	7,0
Indonesia	11,2	10,3	9,1	8,4	7,9	7,1	6,6	6,2
Malaysia	3,5	3,3	3,2	3,3	3,7	3,3	3,1	3,0
Singapura	5,6	2,6	2,1	2,2	3,0	2,2	2,0	2,0
Thailand	1,4	1,5	1,4	1,4	0,9	0,7	0,4	0,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Tenaga Kerja

Giorgio Brunello (2001) mengemukakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan mengurangi pengangguran tetapi tidak dapat menghilangkan sepenuhnya angka pengangguran. Pengangguran akan selalu terjadi di mana saja di negara manapun termasuk negara maju dengan teknologi yang super canggih. Namun, semakin banyak masyarakat yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi maka semakin kecil pula jumlah pengangguran di suatu negara termasuk di Indonesia, meskipun hal ini disertai asumsi bahwa faktor-faktor lainnya tidak mempengaruhi atau *ceteris paribus*.

Dukungan pemerintah terhadap tingkat penyerapan pendidikan tinggi juga semakin meningkat untuk mengurangi angka pengangguran serta untuk menyempitkan *lag* antara jumlah lulusan SMA dengan penyerapan di tingkat pendidikan tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui *Expenditure per student, tertiary (% of GDP per capita)*. *Expenditure per student tertiary* merupakan presentase pengeluaran pemerintah dari PDB perkapita yang digunakan untuk membiayai satu orang mahasiswa. Kata *tertier* di sini

adalah total pengeluaran publik per siswa untuk pendidikan tinggi, pengeluaran pemerintah termasuk belanja pemerintah pada lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta) dan administrasi pendidikan serta subsidi untuk swasta (mahasiswa/rumah tangga dan entitas swasta lainnya). *Expenditure per student tertiary* di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. *Expenditure Per Student Tertiary* Indonesia (dalam %)

Sumber : *World Bank, Education Indicators*

Grafik di atas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi setiap tahunnya meningkat sehingga diharapkan masyarakat mampu memperoleh pendidikan tinggi. Namun, kenyataannya inflasi terus meningkat dan membuat harga-harga naik termasuk harga pendidikan. Pendidikan tinggi masih tetap dianggap mahal oleh sebagian masyarakat. Sementara itu pemerintah sendiri hanya mewajibkan sekolah hingga jenjang SMP dengan program wajib belajar 9 tahun sehingga pendidikan tinggi tidak menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

J.L De Meulemeester dan D. Rochat (1998) mengemukakan konsumen memilih barang dan jasa yang memberikan utilitas tertinggi dengan *budget constrains* yang mereka miliki. Seperti halnya permintaan untuk barang dan jasa, permintaan pendidikan juga memiliki hukum yang sama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pendidikan tinggi berkaitan erat dengan pendapatan dan biaya. Dalam penelitian J.L De Meuleeester dan penelitian lainnya ditemukan bahwa pendidikan memiliki hubungan positif dengan pendapatan.

Di Indonesia biaya pendidikan tinggi masih dianggap relatif mahal oleh sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan biaya kuliah di Indonesia dengan Negara Singapura dan Malaysia, seperti berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Biaya Kuliah di Indonesia dengan Singapura dan Malaysia tahun 2011

Negara	PDB	Biaya Kuliah
Singapura	US\$ 57.505	Rp 76.400.000
Indonesia	US\$ 4.200	Rp 20.000.000
Malaysia	US\$ 49.494	Rp 23.700.000

Sumber: Kompas.com

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari segi jumlah nominal, biaya kuliah atau pendidikan tinggi di Indonesia merupakan jumlah yang paling rendah dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia. Namun jika biaya kuliah tersebut dibandingkan dengan jumlah PDB yang dimiliki oleh masing-masing negara maka biaya kuliah di Indonesia menempati urutan paling besar atau paling mahal.

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa dari sisi permintaan ada dua hal yang paling berpengaruh untuk menentukan tingkat penyerapan pendidikan. Pertama, *Human Capital Return* (manfaat yang akan diperoleh oleh individu, keluarga dan masyarakat sosial atas pendidikan yang ditempuh, baik berupa materi maupun nonmateri). Kedua, biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh individu dan keluarganya.

Hubungan antara tingkat permintaan pendidikan tinggi dapat dilihat melalui elastisitas harga dan elastisitas pendapatan pada komoditi pendidikan tinggi yang nantinya akan dapat dilihat pendidikan tinggi tergolong dalam jenis barang apa menurut klasifikasi elastisitasnya.

Dari uraian di atas penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan tinggi seperti pendapatan masyarakat, biaya pendidikan, tingkat pengangguran, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah berpengaruh terhadap permintaan pendidikan tinggi di 33 Provinsi di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia relatif masih rendah.

2. Permintaan pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi kendala biaya yang relatif tinggi.
3. Persentase angka melanjutkan dari siswa sekolah menengah ke jenjang pendidikan tinggi dalam lima tahun ini terus menurun.
4. Pendidikan tinggi masih dianggap sebagai barang mewah untuk sebagian masyarakat Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah yang ditemukan peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan dengan permintaan pendidikan tinggi di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di 33 provinsi Indonesia pada tahun 2006-2013.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku permintaan pendidikan tinggi di Indonesia ditinjau dari perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi tersebut yakni biaya pendidikan, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah serta untuk mengetahui jenis elastisitas pendapatan dan elastisitas harga dari pendidikan tinggi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh biaya pendidikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh pendapatan masyarakat terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh pekerja tingkat universitas terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh tingkat lulusan sekolah menengah terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.
6. Mengetahui jenis elastisitas harga dan elastisitas pendapatan pada komoditi pendidikan tinggi di Indonesia.
7. Mengetahui pengaruh biaya pendidikan, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian dalam bidang permintaan pendidikan.

- c. Hasil studi dalam penelitian ini akan memperkuat kajian teoritis pada topik permintaan dan elastisitas dalam mata kuliah ekonomi mikro serta topik barang dan kebijakan publik pada mata kuliah ekonomi publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Peneliti menjadi tahu faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya.

b. Bagi pengambil kebijakan

Sebagai alat evaluasi dan menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya dalam dunia pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Permintaan Pendidikan

a. Pengertian Permintaan

Permintaan diartikan sebagai perilaku konsumen dalam membeli satu jenis barang dan jasa tertentu (Mankiw: 2004). Permintaan tunduk pada hukum permintaan yang berbunyi jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta naik dan sebaliknya. Hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga bersifat negatif. Permintaan menggambarkan kesanggupan konsumen dalam membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga pada periode waktu tertentu. Hukum permintaan berlaku untuk semua barang dan jasa termasuk pada sektor pendidikan, meskipun tetap pada asumsi bahwa faktor-faktor lainnya tidak mempengaruhi atau *ceteris paribus*.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pendidikan

Faktor utama yang mempengaruhi permintaan pendidikan khususnya pendidikan tinggi menurut Clotfelter (1991) dikarenakan adanya *multi benefits* dari pendidikan itu sendiri dimana individu sangat percaya bahwa pendidikan akan memberikan berbagai manfaat baik secara ekonomi dan nonekonomi bagi dirinya. Manfaat ekonomi dari pendidikan tinggi sudah banyak diketahui masyarakat umum yakni individu akan memperoleh upah yang relatif lebih tinggi dari

jenjang pendidikan di bawahnya. Hal ini dikarenakan menurut teori *human capital* bahwa pendidikan tinggi memberikan pengetahuan dan pelatihan lebih mendalam pada studi yang dipelajarinya sehingga membuat individu menjadi lebih produktif dan mengakibatkan upah yang diperolehnya lebih tinggi pula. Implikasinya meruntut dari teori permintaan sangat jelas, individu akan menambah investasi pada pendidikan seiring dengan naiknya upah di masa yang akan datang. Individu mahasiswa dan keluarganya juga akan memperoleh manfaat non-ekonomi dari pendidikan tinggi. Salah satunya yakni terkait dengan kesempatan kerja di masa yang akan datang dan meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan manusia di suatu negara. Pada tingkat tertentu, motif terkait selera/preferensi lebih dominan mendorong individu memasuki pendidikan tinggi dan tidak berbeda dengan permintaan pada barang dan jasa secara umumnya, meskipun selera tidak dapat dihitung menggunakan angka seperti faktor-faktor lainnya. Sebagian masyarakat memasuki pendidikan tinggi karena adanya tuntutan kelas sosial. Kelas sosial atas akan tetap mengikutsertakan anggota keluarganya menikmati pendidikan tinggi di institusi pendidikan tinggi yang dianggap *bonafid* meskipun kemampuannya lebih rendah dibanding dengan yang lain. Atau sebaliknya sebagian besar keluarga yang berada di kelas sosial bawah tidak memiliki keinginan untuk mendaftarkan keluarganya ke

pendidikan tinggi meskipun manfaat ekonominya tinggi dan dapat mengubah kehidupan ekonomi keluarganya.

Sedangkan menurut Nwadiani (2000) faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan merupakan fungsi dari faktor ekonomi itu sendiri diantaranya biaya, pendapatan, harapan di masa yang akan datang serta faktor non-ekonomi meliputi tingkat pengangguran dan faktor sosial budaya.

1) Biaya

Biaya merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi permintaan pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya yang langsung yang akan ditanggung oleh individu dan keluarganya untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang biasanya ditanggung meliputi *tuition fees*, buku, transportasi, indekost dan uang saku. Sedangkan *indirect cost* merupakan biaya yang secara tidak langsung akan ditanggung oleh individu dan keluarganya. *Indirect cost* dalam pendidikan adalah *forgone earnings* yang seharusnya diperoleh ketika individu bekerja namun pendapatan tersebut tidak bisa diperoleh karena individu lebih memilih pendidikan. Faktor biaya ini sangat berpengaruh terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, mereka tidak bisa mendaftarkan anggota keluarganya dalam pendidikan jika biaya pendidikan mahal.

2) Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu faktor utama lainnya yang mempengaruhi permintaan pendidikan. Keluarga yang memiliki tingkat pendapatan rendah tidak akan dengan mudah memutuskan untuk mendaftarkan anggota keluarganya pada pendidikan terutama jenjang pendidikan tinggi. Sekalipun pemerintah menerapkan program pendidikan gratis namun keluarga yang berpendapatan rendah akan tetap memperhitungkan biaya lainnya seperti *forgone earnings* dan biaya langsung diluar dari *tuition fees* seperti biaya indekost, transportasi, buku dan lain-lain. Jika keluarga berpendapatan rendah akan mendaftarkan anggota keluarganya pada pendidikan tinggi maka mereka akan cenderung selektif dimana hanya anggota keluarganya yang memiliki kemampuan tinggi secara intelegensi-lah yang akan didukung untuk masuk dalam dunia pendidikan tinggi (Nwadiani: 2000).

3) Harapan Di Masa yang Akan Datang

Pendidikan merupakan salah satu investasi yang menguntungkan bagi masa depan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa para orang tua memilih investasi pada pendidikan bagi anggota keluarganya meskipun biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Para orang tua ini memiliki harapan jika anggota keluarganya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka di masa yang akan datang mereka akan mendapatkan upah yang lebih

tinggi pula serta akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat.

4) Tingkat Pengangguran

Permintaan pada pendidikan akan semakin meningkat apabila pekerjaan yang tersedia dimasa yang akan datang memiliki prospek yang bagus. Dengan kata lain jika prospek pekerjaan tidak bagus maka permintaan pada pendidikan akan menurun. Hal ini disebabkan masyarakat tidak termotivasi masuk dalam pendidikan karena ketidakpastian pekerjaan yang akan diperoleh nantinya.

5) Sosial dan Budaya

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan pendidikan adalah faktor sosial dan budaya. Adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat akan mempengaruhi individu untuk mengenyam pendidikan. Misalnya, pada masyarakat tertentu dimana yang bisa mengakses pendidikan hanya kaum laki-laki saja sedangkan perempuan tidak bisa karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa pendidikan hanya akan memberikan ilmu yang dapat disalahgunakan oleh perempuan dan selanjutnya dapat membuat perempuan mengingkari fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini masih sangat dominan pada negara berkembang dan negara miskin di dunia dimana banyak dari para penduduk perempuan tidak bisa mengakses pendidikan.

c. Cara Mengukur Permintaan Pendidikan Tinggi

Cara mengukur permintaan pada pendidikan tinggi dapat dilihat dari jumlah pendaftar yang mendaftar dan diterima di sebuah institusi pendidikan atau dapat dilihat dari jumlah keseluruhan pendaftar (diterima maupun tidak diterima) di sebuah institusi pendidikan (Clotfelter: 1991). Menurut Meullemester (1998) cara mengukur permintaan pada pendidikan tinggi juga bisa diukur dari rasio jumlah mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi dengan jumlah penduduk usia dimana seseorang seharusnya masuk dalam jenjang pendidikan tinggi (di Belgia 18 tahun dan di Indonesia 19-24 tahun)

Konsumen atau orang yang meminta pendidikan tinggi adalah para mahasiswa itu sendiri namun akan tidak realistis apabila tidak mengikutsertakan orangtua sebagai konsumen aktif karena dibanyak kasus orangtua-lah yang membiayai pendidikan mahasiswa baik biaya pendidikan maupun biaya uang saku. Dalam konsep permintaan, diasumsikan konsumen mengetahui informasi lengkap mengenai barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Namun, asumsi tersebut tidak realistis untuk beberapa barang dan jasa khususnya pada barang dan jasa yang secara teknik sulit untuk diketahui tingkat kualitasnya. Salah satunya adalah pendidikan, masyarakat dapat melihat kualitas penyedia pendidikan dengan melihat ranking tiap institusi pendidikan, masyarakat juga dapat membandingkan antara satu institusi pendidikan dengan yang lain. Namun, cara ini dianggap tidak bijaksana karena

tiap institusi pendidikan mempunyai ciri khas dan keunggulan yang berbeda antara satu dengan yang lain.

2. Pendidikan Tinggi

a. Pengertian Pendidikan Tinggi

UU No. 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan pendidikan tinggi menurut UU No. 12 tahun 2012 adalah:

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Menurut PP Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi (PP-PT), tujuan dari pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

b. Fungsi Pendidikan Tinggi

Fungsi pendidikan tinggi menurut UU No. 12 Tahun 2012 pasal 4 adalah:

- 1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 2) Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- 3) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Sedangkan fungsi pendidikan tinggi menurut UNESCO dalam Tilak (2009) meliputi:

- 1) Pendidikan tinggi mampu membantu menciptakan, memajukan, menyerap dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengajaran.
- 2) Pendidikan tinggi mampu membantu kemajuan industri dalam perekonomian dengan menyediakan tenaga kerja yang professional dan memiliki kemampuan teknik serta manajerial yang baik. Mampu mentransformasi masyarakat menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Pendidikan tinggi tidak hanya menyediakan pekerja terdidik namun juga pekerja yang memiliki ilmu

pengetahuan yang sangat penting untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi.

- 3) Universitas adalah institusi yang membantu membangun karakter dan moral mahasiswa, universitas mampu menanamkan nilai etika dan moral, menciptakan sikap tertib dan membuat perubahan sikap masyarakat yang dibutuhkan dalam era modernisasi dengan menjaga dan meningkatkan nilai-nilai sosial yang ada.
- 4) Pendidikan tinggi juga dapat membantu pembentukan negara yang kuat, dengan menciptakan masyarakat yang berperan aktif dalam politik, sosial, budaya dan ekonomi sebagai kontribusi dalam negara demokrasi. Selain itu, pendidikan tinggi juga mampu menciptakan masyarakat yang mampu mengetahui, mempertahankan, meningkatkan dan mengenalkan budaya nasional, regional, internasional dan sejarah. Pendidikan tinggi juga dapat menciptakan pemimpin sosial dan politik masa depan yang memiliki kaliber dan visi tinggi.

c. Manfaat Pendidikan Tinggi

Menurut Tilak (2009) menyebutkan bahwa pendidikan tinggi memiliki manfaat tidak hanya untuk individu mahasiswa tetapi juga untuk keseluruhan masyarakat. Ada dua macam manfaat pendidikan tinggi yaitu manfaat secara ekonomi dan secara sosial. Manfaat ekonomi dari pendidikan tinggi adalah manfaat dalam lingkup ekonomi seperti dampak pada fiskal dan moneter, pasar tenaga kerja

dan kemajuan perekonomian. Dampak yang paling penting dalam perekonomian adalah dapat menciptakan produktivitas yang meningkat dalam suatu industri karena sumber daya manusia dianggap lebih produktif. Manfaat spesifik ekonomi lainnya mencakup peningkatan pendapatan pajak, peningkatan tabungan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan, peningkatan tingkat konsumsi masyarakat, peningkatan penawaran tenaga kerja terdidik dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan program kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu manfaat secara sosial dari pendidikan tinggi biasanya dihubungkan dengan pendidikan tinggi sebagai barang publik yang memiliki eksternalitas positif besar yang dinikmati oleh masyarakat umum. Manfaat sosial pendidikan tinggi juga dapat berupa memajukan kesejahteraan masyarakat namun tidak secara ekonomi, diantaranya adalah mampu menurunkan tingkat kriminalitas, menciptakan masyarakat toleran yang mampu menghargai segala perbedaan, menurunkan tingkat pernikahan dini yang dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kesadaran kesehatan dan pendidikan dan lain lain. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintah di negara demokrasi, dengan menciptakan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

3. Angka Partisipasi Pendidikan

Angka partisipasi dalam pendidikan merupakan gambaran sejauh mana tingkat penyerapan pendidikan formal di dalam masyarakat dan juga sebagai indikator tingkat permintaan masyarakat akan pendidikan. Dalam pengelompokan usia pada angka partisipasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan empat rentang usia. Pertama, rentang usia 7-12 tahun diasumsikan untuk usia sekolah pada jenjang sekolah dasar. Kedua, rentang usia 13-15 tahun merupakan usia untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Ketiga, usia 16-18 merupakan usia pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas dan terakhir usia 19-24 tahun yang merupakan usia pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini digunakan rentang usia 19-24 tahun sebagai usia mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Adapun angka partisipasi dalam pendidikan terbagi menjadi tiga kategori yakni:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Menurut BPS angka partisipasi sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi khususnya anak usia sekolah dalam proses kegiatan pendidikan formal. APS juga digunakan untuk melihat tingkat kemampuan lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam menyerap warga belajar terutama anak usia sekolah. Dalam menghitung angka partisipasi sekolah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{APS } 19-24 = \frac{P_{19-24} \text{ Masih Sekolah}}{P_{19-24}} \times 100\%$$

Dimana APS 19-24 adalah Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 19-24 tahun; P_{19-24} masih sekolah adalah jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang masih sekolah; P_{19-24} adalah jumlah penduduk usia 19-24 tahun.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK pendidikan tinggi merupakan persentase jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang sedang kuliah di pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk usia 19-24 tahun atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$APK_{PT} = \frac{P_{PT}}{P_{19-24}} \times 100\%$$

Dimana APK_{PT} adalah angka partisipasi kasar penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tinggi; P_{PT} adalah jumlah penduduk yang sekolah/kuliah di pendidikan tinggi; P_{19-24} adalah jumlah penduduk usia 19-24 tahun.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Nilai APM dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{APM PT} = \frac{P_{19-24 PT}}{P_{19-24}} \times 100\%$$

Dimana APM PT adalah angka partisipasi murni penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tinggi (PT); $P_{19-24 PT}$ adalah jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang sekolah/kuliah di pendidikan tinggi; P_{19-24} adalah jumlah penduduk usia 19-24 tahun.

4. Biaya Pendidikan

Faktor utama yang mempengaruhi permintaan adalah harga. Hal ini berarti bahwa harga atau biaya pada pendidikan tinggi sangat berpengaruh pada tingkat permintaan pendidikan tinggi. Menurut teori permintaan, naiknya biaya pendidikan tinggi akan menurunkan jumlah pendaftar pendidikan tinggi dan sebaliknya. Masalah ini terutama berlaku untuk keluarga lulusan sekolah menengah atas yang memiliki pendapatan rendah.

Sedangkan biaya pendidikan sendiri adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu (siswa) keluarga yang membiayai pendidikan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Menurut Pandit (1981) jenis biaya dalam pendidikan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu biaya langsung (*Direct Cost*) dan biaya tidak langsung (*Indirect Cost*). Biaya langsung meliputi keseluruhan biaya yang dibayarkan atau digunakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan.

Di Indonesia biaya langsung ini digunakan untuk membiayai Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat. Sesuai UU No 12 Tahun 2012 biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa ditetapkan maksimal sepertiga dari biaya operasional perguruan tinggi. Menurut Clotfeter (1991) biaya pendidikan pada pendidikan tinggi diwujudkan dalam bentuk uang kuliah yang merupakan *users charge* atas barang publik. Mekanisme terbentuknya harga atas pendidikan tidak melalui proses tawar-menawar atau tarik-menarik permintaan dan penawaran melainkan telah dipatok terlebih dahulu dari awal. Biaya ini dapat berubah-ubah naik atau turun tergantung pada kebijakan pembiayaan pendidikan dan juga tingkat inflasi yang diperhitungkan.

Namun biaya langsung hanya merupakan salah satu sisi biaya yang ada dalam pendidikan. Biaya lainnya adalah biaya tidak langsung dalam pendidikan adalah hilangnya alternatif kesempatan lain yang seharusnya bisa diperoleh individu ketika dirinya tidak memilih pendidikan. Tipe biaya tidak langsung dalam pendidikan biasanya disebut sebagai *opportunity cost*. Menurut penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara *real cost* dan *opportunity cost*. Biaya pendidikan dapat digambarkan melalui persamaan berikut:

$$\text{Biaya Pendidikan} = \text{Expenditure} + \text{Opportunity Cost}$$

Ada beberapa jenis biaya lainnya dalam pendidikan diantaranya:

a) *Privat Cost*

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh individu atau keluarganya untuk keperluan yang sifatnya pribadi dalam menempuh pendidikan termasuk *opportunity cost* yang ditanggungnya sendiri. Jenis biaya pribadi yang ditanggung meliputi uang saku, biaya transportasi, *tuition fees*, buku dan lain-lain serta pendapatan individu yang hilang ketika dirinya memilih pendidikan.

b) *Institutional Cost*

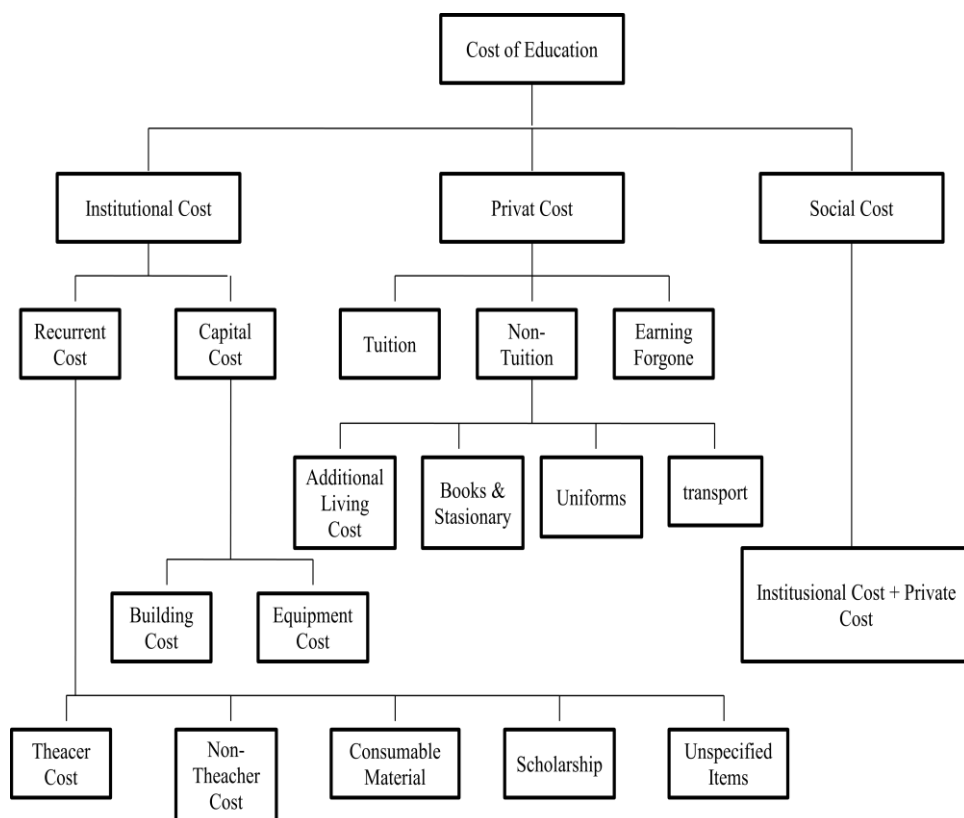
Dalam biaya ini terdapat dua jenis biaya yaitu *capital cost* dan *recurrent cost*. *Capital cost* merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai faktor input yang tahan lama misalnya gedung, tanah, peralatan yang digunakan dalam pendidikan, furniture dan lain-lain. Sedangkan *recurrent cost* merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai barang yang tidak tahan lama misalnya biaya gaji dan tunjangan, biaya perbaikan dan perawatan, biaya air dan listrik dan lain-lain. Untuk *recurrent cost* terutama biaya gaji dan tunjangan merupakan biaya yang memakan porsi terbesar dari total pengeluaran pendidikan. Di Indonesia porsi biaya gaji dan tunjangan memakan 55% dari total anggaran pendidikan, di Sri Lanka 94% dan di Marroco sebesar 95%.

c) *Social Cost*

Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan atau organisasi untuk membiayai segala keperluan

pendidikan. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orang tua saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah dan orangtua maupun masyarakat.

Jenis-jenis biaya pendidikan dapat dilihat melalui diagram berikut:



Gambar 2: Jenis-jenis Biaya Pendidikan (Pandit: 1981)

Pada beberapa penelitian, pengaruh biaya pendidikan terhadap angka pendaftaran atau angka partisipasi pada pendidikan tinggi bernilai negatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dave. E Marcote (2008) di *United State of America* dimana penelitian menunjukkan angka koefisien elastisitas sebesar -0,107. Hal tersebut juga diperoleh Carl C. Brown (2012) yang

dilakukan di *Florida Southern College* yang memiliki nilai koefisien elastisitas sebesar -1,8. Jadi, diasumsikan dalam penelitian ini nilai dari pengaruh biaya pendidikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia akan diperoleh angka negatif sesuai dengan hukum permintaan yang berlaku.

5. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan faktor umum yang sering ditemukan dalam membahas permintaan termasuk dalam permintaan pada pendidikan tinggi. Pada barang dan jasa pada umumnya, jumlah yang dikonsumsi akan naik seiring dengan naiknya pendapatan. Dalam model *human capital* pendapatan memang bukan merupakan satu-satunya faktor investasi pada pendidikan tinggi. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa pendidikan tinggi sangat bergantung pada pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, karena biaya pendidikan tinggi yang cukup besar menyebabkan pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai pendidikan tinggi keluarganya meskipun sebenarnya pendidikan tinggi akan menaikkan pendapatan mereka di kemudian hari (Clotfelter: 1991). Untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia *proxy* yang digunakan adalah nilai PDRB per Kapita.

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota) dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun

kelender). Dalam penghitungannya, untuk menghindari perhitungan ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku apabila nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

Sedangkan PDRB per Kapita merupakan nilai PDRB setelah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB per Kapita dapat dilihat dari rumus berikut:

$$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\Sigma \text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Menurut Clotfelter (1991) pendidikan tinggi merupakan komoditi yang memiliki *highly income-elasticity*. Pendapatan selalu memiliki

pengaruh positif terhadap tingkat permintaan pendidikan tinggi. Jadi dalam asumsi *ceteris paribus* ketika tingkat pendapatan naik maka tingkat permintaan pendidikan tinggi akan naik dan sebaliknya

6. Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Data pengangguran dikumpulkan BPS melalui survey rumah tangga, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Diantara sensus/survei tersebut Sakernas merupakan survei yang khusus dirancang untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara periodik. Saat ini Sakernas diselenggarakan dua kali setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

b. Jenis-jenis Pengangguran

Adapun jenis-jenis Pengangguran menurut Sukirno (2011) adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Penyebabnya

- a) Pengangguran Friksional, adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh.

- b) Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
 - c) Pengangguran Struktural, adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
 - d) Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.
- 2) Berdasarkan Cirinya
- a) Pengangguran Musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.
 - b) Pengangguran Terbuka, pengangguran yang terjadi karena penambahan lapangan kerja lebih rendah daripada penambahan pencari kerja.
 - c) Pengangguran Tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.

d) Setengah Menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari) disebut *Underemployment*.

c. Cara Mengukur Pengangguran

Cara mengukur angka pengangguran yakni dengan menggunakan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = (\text{Pencari Kerja} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100\%$$

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan.

Secara spesifik, tingkat pengangguran terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan,
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha,

- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya adalah seluruh penduduk berusia 15 – 64 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (hasil sensus penduduk 1971 dan 1980). Jadi, tenaga kerja (*man power*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.

Secara demografis angkatan kerja (*labour force*) bergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Angkatan kerja yang bekerja
 - a) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari.
 - b) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah pekerja tetap, petani-petani dan orang-orang yang bekerja dalam keahlian.
- 2) Angkatan kerja yang mencari pekerjaan
 - a) Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari/mendapatkan pekerjaan.
 - b) Mereka yang pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan.
- 3) Mereka yang dibebaskan tugas dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Konsep tenaga kerja erat kaitannya dengan permintaan pada pendidikan tinggi. Hal ini diutarakan oleh Bikas C. Sanyal dalam Notodihardjo (1990) yang melakukan penelitian di Sudan dimana individu memutuskan untuk masuk ke pendidikan tinggi karena alasan kualifikasi untuk pekerjaan yang semakin meningkat dan harapan akan adanya gaji yang lebih besar dibandingkan dari lulusan pendidikan dasar maupun menengah. Tenaga kerja yang menjadi acuan bagi para pendaftar pendidikan tinggi dalam penelitian ini adalah penduduk yang bekerja pada

tingkat pendidikan universitas. Menurut Lee Harvey (2000), dalam suatu organisasi seperti perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terdidik supaya bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut efektif dan efisien.

8. Tingkat Lulusan Sekolah Menengah

Di Indonesia terdapat dua jenis sekolah menengah, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keduanya walaupun sama-sama sekolah menengah namun memiliki konsentrasi yang berbeda. SMA memiliki kurikulum yang lebih menekankan pada teori dari pada praktek, lulusan dari SMA ini lebih dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan SMK memiliki kurikulum yang dirancang supaya para lulusannya siap masuk dalam dunia kerja karena di SMK lebih banyak praktik dari pada teori.

Meskipun memiliki konsentrasi yang berbeda namun kedua sekolah menengah ini merupakan *supply* pada jumlah konsumen pada pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan syarat untuk masuk dalam pendidikan tinggi yaitu wajib menamatkan pendidikan menengah. Baik SMA maupun SMK keduanya memiliki kemampuan untuk bersaing dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Tingkat lulusan sekolah menengah ini merupakan salah satu faktor *non-price* yang dapat mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi. Markote (2008) dalam penelitiannya mendapatkan hasil positif dari pengaruh tingkat lulusan sekolah menengah terhadap permintaan pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini diprediksi bahwa tingkat lulusan

sekolah menengah akan berpengaruh positif terhadap permintaan pendidikan tinggi.

9. Elastisitas

Menurut Gregory Mankiw (2004) elastisitas permintaan/penawaran adalah ukuran besarnya respon jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap perubahan salah satu penentunya. Dengan kata lain elastisitas adalah tingkat kepekaan (perubahan) suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Beberapa ukuran elastisitas permintaan dapat dinyatakan dalam konsep seperti berikut ini:

a. Elastisitas Harga (*Price elasticity of demand*)

Elastisitas harga merupakan angka yang mengukur persentase perubahan jumlah suatu barang yang diminta apabila harga barang itu sendiri berubah sebesar 1 persen. Koefisien elastisitas harga pada umumnya akan bertanda negatif. Negatifnya angka elastisitas harga terjadi karena berlakunya hukum permintaan dalam perilaku permintaan.

b. Elastisitas Pendapatan (*Income elasticity of demand*)

Elastisitas pendapatan merupakan angka yang mengukur persentase perubahan jumlah suatu barang yang diminta apabila pendapatan konsumen berubah sebesar 1 persen. Koefisien elastisitas pendapatan bisa bertanda positif atau negatif tergantung jenis barangnya. Apabila koefisien elastisitas pendapatan bertanda positif (+) maka barang tersebut bisa digolongkan sebagai barang normal atau mewah

sedangkan apabila koefisien elastisitas pendapatan bertanda negatif (-) maka barang tersebut bisa digolongkan sebagai barang inferior.

c. Elastisitas Silang (*Cross elasticity of demand*)

Elastisitas silang merupakan angka yang mengukur persentase perubahan jumlah suatu barang yang diminta apabila harga barang lain berubah sebesar 1 persen. Koefisien elastisitas silang bisa bertanda positif atau negatif tergantung macam penggunaan kedua barang bagi konsumen. Apabila koefisien elastisitas silang bertanda positif (+) maka kedua barang merupakan barang yang saling mensubstitusi sedangkan apabila koefisien elastisitas silang bertanda negatif (-) maka kedua barang merupakan barang-barang yang saling melengkapi.

Secara umum nilai koefisien elastisitas bisa diklasifikasikan menurut sifat elastisitasnya. Bila angka koefisien elastisitas sama dengan nol disebut inelastis sempurna, kurang dari satu disebut inelastis, sama dengan satu disebut uniter elastis, lebih dari satu disebut elatis dan tidak terhingga disebut elastis sempurna.

B. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permintaan pendidikan tinggi. Berikut adalah *summary* dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. J.L De Meulemeester dan D. Rochat (1998) dalam penelitiannya yang berjudul *Demand for University Education in Belgium: on the Relative Importance of Economic and Cultural Determinants* dengan menggunakan

model regresi data panel dengan data *time series* dari tahun 1977-1990 dan data *cross section* sebanyak 43 wilayah administrasi serta menggunakan variabel antara lain: permintaan pendidikan tinggi, tingkat pengangguran, *professional intellectual workers*, rata-rata penerimaan fiskal per kapita dan jumlah perguruan tinggi. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa variabel tingkat pengangguran, rata-rata penerimaan fiskal dan *professional intellectual workers* berpengaruh signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Belgia sedangkan variabel jumlah perguruan tinggi tidak signifikan. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan pendidikan tinggi, sedangkan rata-rata penerimaan fiskal per kapita dan *professional intellectual workers* memiliki pengaruh positif terhadap permintaan pendidikan tinggi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Carlos Rodrigues Vieira dan Viegas Vieira tahun 2011 yang berjudul *Determinants and Projections of Demand for Higher Education in Portugal* yang menggunakan analisis data *time series* dengan analisis regresi berganda menemukan hasil bahwa jumlah penduduk usia 18-20 tahun, jumlah lulusan sekolah menengah, proporsi jumlah mahasiswa (wanita) di pendidikan tinggi, tingkat lulusan S-1, jumlah tahun wajib belajar dan *dummy* untuk langsung atau menunda melanjutkan pendidikan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah permintaan pendidikan tinggi di Portugal. Sedangkan jumlah pengangguran dan biaya pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan pendidikan tinggi di Portugal.

3. Pada tahun 2008 Steven W. Hemelt dan Dave E. Marcote melakukan penelitian yang berjudul *Rising Tuition and Enrollment in Public Higher Education* menggunakan metode OLS dengan data panel untuk periode 1991-2007 dengan sampel 600 universitas publik di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat pengangguran dan biaya pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan pendidikan tinggi sedangkan variabel lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Variabel yang dominan dalam mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi dalam penelitian ini adalah pendapatan masyarakat sebesar 0,36895.
4. Mahardynastika Nindya Hapsari dan Tyas Danarti Hascaryani tahun 2011 melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Respon Permintaan Pendidikan Tinggi Terhadap Kenaikan Biaya Kuliah dan Pendapatan Masyarakat di Kota Malang (Studi Kasus pada Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang)” yang menggunakan rumus elastisitas harga dan pendapatan. Dalam penelitian ditemukan hasil bahwa pendidikan tinggi termasuk golongan barang mewah yang ditunjukkan dengan koefisien elastisitas pendapatannya sebesar 1,02.
5. Carl C. Brown, Andrea McClary dan Jared Bellingar (2012) melakukan penelitian yang berjudul “*Determinants of Student Demand at Florida Southern College*” dengan menggunakan metode OLS. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa variabel biaya pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi permintaan pendidikan di *Florida Southern College*

sedangkan variabel pendapatan masyarakat dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif serta variabel tingkat lulusan sekolah menengah memiliki pengaruh negatif.

Dalam penelitian ini digunakan kajian empiris oleh J.L De Meullemester dan D. Rochat (1998) sebagai acuan utama penelitian ini. Dalam penelitiannya Meullemester menggunakan model $ENR_{it} = a_{it} + b_{1it}UN_{it} + b_{2it}PINT_{it} + b_{3it}YFISC_{it} + b_{4it}S_{it} + e_{it}$, dimana ENR adalah jumlah pendaftar pada pendidikan tinggi yang diproyeksikan dengan rasio jumlah penduduk yang mendaftar pendidikan tinggi dengan jumlah penduduk usia 18 tahun, UN adalah tingkat pengangguran, PINT adalah *Professional Intellectual Workers*, YFISC adalah rata-rata pendapatan fiskal dan S adalah jumlah perguruan tinggi. Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel jumlah perguruan tinggi tetapi menggunakan variabel biaya pendidikan dan variabel persentase tingkat lulusan sekolah menengah serta dalam penelitian ini akan digunakan spesifikasi model semilog.

C. Kerangka Berfikir

1. Pengaruh biaya pendidikan terhadap permintaan pendidikan tinggi

Biaya pendidikan merupakan elemen penting dalam membuat keputusan untuk masuk ke pendidikan tinggi terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia. Pada negara berkembang bisa dikatakan kesadaran masyarakatnya masih relatif rendah untuk melakukan investasi pada sektor pendidikan terutama untuk pendidikan tinggi. Di Indonesia sendiri pendidikan hanya diwajibkan sampai jenjang sekolah menengah

pertama melalui program pemerintah wajib belajar sembilan tahun dan program tersebut juga masih dipertanyakan karena tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan sampai jenjang SMP meskipun itu merupakan program wajib.

Di Indonesia pendidikan tinggi masih dianggap sebagai barang mewah karena biaya pendidikan yang cukup tinggi. Biaya pendidikan merupakan *constrain* yang dihadapi sebagian besar masyarakat. Sesuai dengan model permintaan, kenaikan yang terjadi pada biaya pendidikan akan mengurangi jumlah permintaan pada pendidikan tinggi dan sebaliknya.

2. Pengaruh pendapatan masyarakat terhadap permintaan pendidikan tinggi

Permintaan barang dan jasa dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada permintaan pendidikan tinggi. Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah (menengah ke bawah) sangat memperhatikan elemen biaya karena mereka harus memastikan pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer yang ada barulah kebutuhan sekunder dan tersier.

Semakin rendah pendapatan masyarakat akan semakin kecil minat mereka dalam menyekolahkan keluarganya terlebih pada pendidikan tinggi dan sebaliknya semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin besar pula kesadaran mereka untuk menyekolahkan keluarganya pada pendidikan yang semakin tinggi.

3. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap permintaan pendidikan tinggi

Giorgio Brunello (1998) mengemukakan bahwa pendidikan dapat mengurangi pengangguran namun tidak dapat menghilangkan keseluruhan pengangguran termasuk di negara maju yang telah menguasai teknologi canggih sekalipun. Pengangguran merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang meskipun jumlahnya berbeda. Di negara maju angka pengangguran cenderung rendah karena perkembangan jumlah populasi penduduk tidak secepat di negara berkembang serta kesadaran masyarakatnya yang tinggi baik di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan lain lain.

Individu akan memilih investasi pendidikan tinggi jika adanya suatu kepastian prospek pekerjaan yang bagus dimasa yang akan datang. Jika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang semakin naik maka dengan sendirinya permintaan akan pendidikan akan turun karena individu tidak bisa berharap bahwa investasi pendidikan yang dilakukannya dapat mengubah nasibnya dimasa depan dan begitupun sebaliknya.

4. Pengaruh pekerja tingkat universitas terhadap permintaan pendidikan tinggi

Di banyak negara terutama negara maju, pemerintah terus memacu perkembangan permintaan pendidikan tinggi karena para lulusan pendidikan tinggi memiliki kontribusi langsung untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara (Lee Harvey: 2000). Selain itu, lulusan

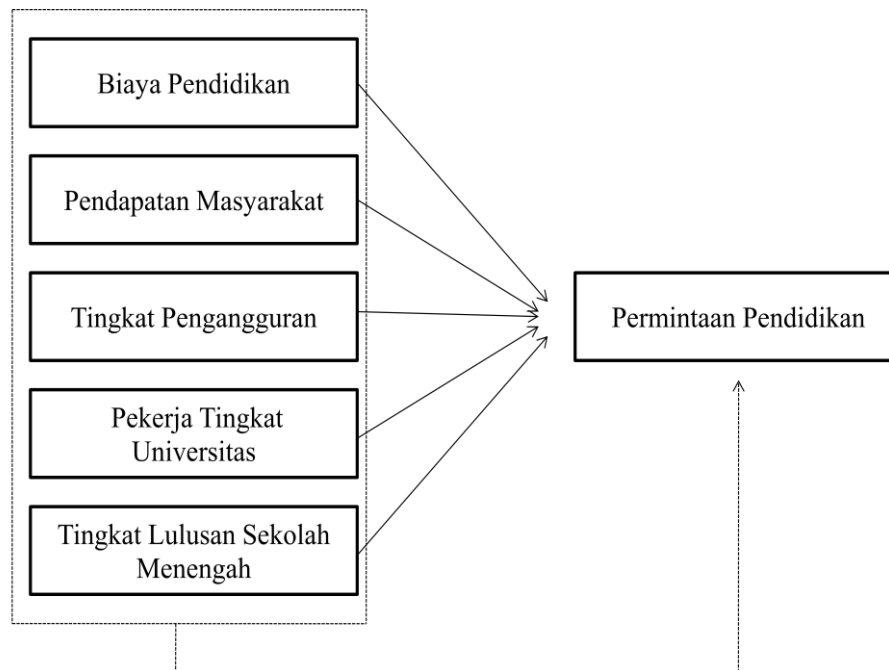
pendidikan tinggi juga dimungkinkan mendapatkan upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya karena dianggap lebih produktif.

Semakin besar jumlah pekerja lulusan pendidikan tinggi (universitas) yang mendapatkan pekerjaan maka akan semakin tinggi pula permintaan pada pendidikan tinggi.

5. Pengaruh tingkat lulusan sekolah menengah terhadap permintaan pendidikan tinggi

Meningkatnya jumlah permintaan pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh jumlah konsumen pada pasar komoditi pendidikan tinggi. Jumlah konsumen pada pendidikan tinggi diproyeksikan oleh tingkat lulusan sekolah menengah baik SMA/SMK. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh mereka yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi adalah harus menamatkan pendidikan menengah. Sehingga jika tingkat lulusan sekolah menengah maka permintaan pada pendidikan tinggi akan naik dan sebaliknya.

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan maka dapat digambarkan bagan paradigma dalam penelitian ini. Berikut paradigma penelitian:



Gambar 3: Paradigma Penelitian

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial

.....▶ : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan

D. Hipotesis

Dari landasan konseptual dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, dapat disusun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

HI (1) : terdapat pengaruh biaya pendidikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

HI (2) : terdapat pengaruh pendapatan masyarakat terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

HI (3) : terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

HI (4) : terdapat pengaruh pekerja tingkat universitas terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

HI (5) : terdapat pengaruh tingkat lulusan sekolah menengah terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

HI (6) : terdapat pengaruh biaya pendidikan, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut (Sugiyono: 2010). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan permintaan pendidikan tinggi sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah biaya pendidikan, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah.

Sedangkan definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Permintaan Pendidikan Tinggi

Variabel permintaan pendidikan tinggi di Indonesia adalah rasio jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang kuliah di pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk yang berusia 19-24 tahun sesuai dengan cara pengukuran permintaan pendidikan tinggi menurut penelitian yang dilakukan oleh Meulemesster tahun 1998. Dalam penelitian ini permintaan pendidikan tinggi menggunakan *proxy* angka partisipasi murni (APM) pendidikan tinggi. Variabel ini dinyatakan dalam satuan persen.

2. Biaya Pendidikan

Variabel biaya pendidikan adalah rata-rata biaya pendidikan riil berupa biaya langsung pada jenjang pendidikan tinggi per tahun. Variabel ini dinyatakan dalam satuan rupiah.

3. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat adalah PDRB per Kapita riil tiap provinsi di Indonesia berdasarkan harga konstan tahun 2000. Variabel ini dinyatakan dalam satuan rupiah.

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah rasio penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka menurut jenjang pendidikan tinggi

(universitas) terhadap jumlah penduduk di masing-masing provinsi setiap tahunnya. Variabel ini dinyatakan dalam satuan persen.

5. Pekerja Tingkat Universitas

Pekerja tingkat universitas adalah rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut tingkat pendidikan universitas yang ditamatkan terhadap jumlah penduduk pada tiap provinsi. Variabel ini dinyatakan dalam satuan persen.

6. Tingkat Lulusan Sekolah Menengah

Tingkat lulusan sekolah menengah merupakan persentase jumlah lulusan sekolah menengah atas (SMA/MA) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Variabel ini dinyatakan dalam satuan persen.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan *World Bank* berupa buku, kamus serta artikel ilmiah. Tipe data yang digunakan adalah data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2009) data panel adalah kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* yang digunakan adalah data tahun 2006-2013 sedangkan data *cross section* berupa data yang meliputi 33 provinsi di Indonesia. Alasan pemilihan rentang tahun 2006-2013 dikarenakan ketersediaan data.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 6.

1. Alat Analisis Regresi Data Panel

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis *Ordinary Least Square* terhadap model kombinasi *time series* dan *cross section* atau disebut juga data panel. Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi observasi setiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan data panel adalah (Gujarati: 2009):

- a. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas sehingga dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
- b. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross-section* atau *time-series* saja.
- c. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross-section*.
- d. Dalam data panel, variabel akan menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data yang tidak lengkap (*unbalanced data*) tidak akan mengurangi ketajaman estimasi

2. Model Analisis Regresi Data Panel

Model analisis regresi data panel memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data *time series* dan *cross section*, yang populer disebut dengan *pooled time series*. Ciri khusus pada data *time series* adalah berupa urutan numerik dimana interval antar observasi atau sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedang data *cross section* adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi sejumlah variabel.

Pemilihan model ekonometrika merupakan langkah penting disamping pembentukan model yang dapat ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan dan analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. Penaksiran model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Enroll} = f(\text{Tuition, Income, Unemp, PIW, HighGrads})$$

Pada penelitian ini akan menghitung nilai elastisitas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk semilog Lin-log dimana variabel terikat berbentuk linier dan variabel bebas berbentuk log (Gujarati: 2009), sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut:

$$Enroll_{it} = \alpha_{it} + \beta_{1it} \log(Tuition_{it}) + \beta_{2it} \log(Income_{it}) + \beta_{3it} (Unemp)_{it} \\ + \beta_{4it} (PIW_{it}) + \beta_{5it} HighGrads_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Enroll	: Permintaan Pendidikan Tinggi
Tuition	: Biaya Pendidikan
Income	: Pendapatan Masyarakat
Unemp	: Tingkat Pengangguran
PIW	: <i>Professional Intellectual Workers</i> / Pekerja Tingkat Universitas
HighGrads	: Tingkat Lulusan Sekolah
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Elastisitas Variabel
i	: Provinsi ke- i (<i>cross section</i>)
t	: Tahun pengamatan (<i>time series</i>)
e	: <i>term of error</i>

3. Teknik Estimasi Regresi pada Data Panel dengan Uji Hausman

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho: *random effect model*

Ha: *fixed effect model*

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel bebas. Jika nilai probabilitas hausman kurang dari alfa maka Ho ditolak dan model yang tepat adalah model *fixed effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas hasuman lebih besar dari alfa maka hipotesis nol gagal ditolak sehingga model yang tepat adalah *random effect*.

Model *random effect* mengistemasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing individu. Sementara itu model *fixed effect* mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnnya.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati: 2009).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera Test (J-B Test)* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode *J-B Test*, yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis, apabila *J-B* hitung $<$ nilai χ^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Gujarati: 2009).

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi di mana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel bebas (Gujarati: 2009). Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini deteksi multikolinieritas akan dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika korelasi bivariat lebih besar dari *rule of thumb* 0,9, maka di dalam model terjadi multikolinieritas (Gujarati: 2009).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji park.

Uji park merupakan prosedur dua tahap. Pada tahap pertama, dilakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas. Setelah mendapatkan \hat{U}_i^2 dari regresi kemudian pada tahap kedua dilakukan regresi kembali dengan menggunakan $\text{Log } \hat{U}_i^2$ sebagai variabel terikatnya.

Selanjutnya, jika nilai *probability* lebih besar dari alfa tingkat signifikansi yang digunakan maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak (Gujarati: 2009).

5. Uji Statistik

a. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel terikat. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_a : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2009).

Pada tingkat signifikansi (α) kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, atau jika probabilitas $F\text{-hitung} <$ tingkat signifikansi maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- 2) Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, atau jika probabilitas $F\text{-hitung} >$ tingkat signifikansi maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat.

b. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1) $H_0 : \beta_1 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel biaya pendidikan secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan tinggi.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel biaya pendidikan secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan pendidikan.

2) $H_0 : \beta_2 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel tingkat pendapatan secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan tinggi.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat pendapatan secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan pendidikan.

3) $H_0 : \beta_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel tingkat pengangguran secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan tinggi.

$H_a : \beta_3 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat pengangguran secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan pendidikan.

- 4) $H_o : \beta_4 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel jumlah pekerja tingkat universitas secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan tinggi.

$H_a : \beta_4 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel jumlah pekerja tingkat universitas secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan pendidikan.

- 5) $H_o : \beta_5 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel tingkat lulusan sekolah menengah secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan tinggi.

$H_a : \beta_5 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat lulusan sekolah menengah secara parsial terhadap variabel permintaan pendidikan pendidikan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Besarnya R^2 berkisar diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Hal ini menunjukkan bahwa bila R^2 semakin mendekati 1 berarti dapat dikatakan bahwa variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variabel terikat mendekati 100%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil analisis data yang menjadi tujuan penelitian seperti yang telah disebutkan pada bab 1. Pembahasan dari hasil penelitian terdiri dari deskripsi data dan hasil estimasi data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

A. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah biaya pendidikan (*Tuition*), pendapatan masyarakat (*Income*), tingkat pengangguran (*Unemp*), jumlah pekerja tingkat universitas (*PIW*) dan tingkat lulusan sekolah menengah (*HighGrades*) dari 33 provinsi di Indonesia periode 2006-2013.

Di bawah ini akan disajikan deskripsi data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Obs
ENROLL (%)	12,54	44,20	3,67	6,75	255
UNEMP (%)	19.47	51.11	1,54	8,68	255
PIW (%)	20.57	54.88	6.31	8.21	255
INCOME (Rp ribu)	8.229,475	47.774,70	2.274,05	7.100,504	255
HIGHGRADES (%)	94.04773	100,00	72.30	5.48	255
TUITION (Rp ribu)	7.881.994,00	24.465.375,00	2.206.200,00	3.242.765,00	255

Sumber: Lampiran 2

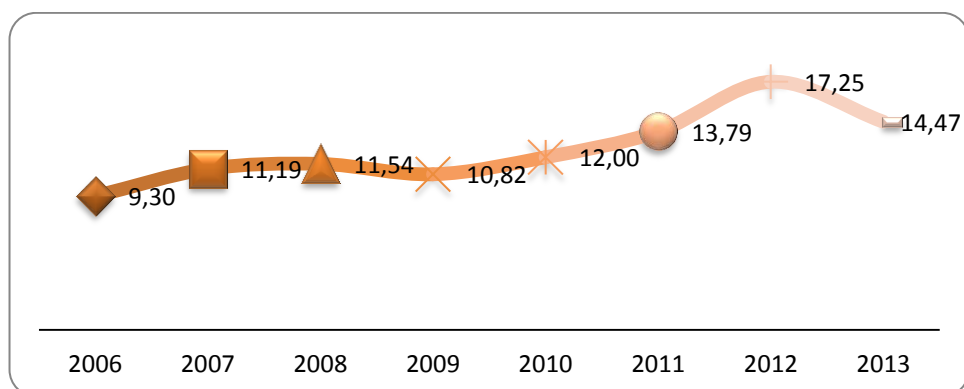
Tingkat permintaan pendidikan di Indonesia yang digambarkan melalui angka partisipasi murni pendidikan tinggi memiliki nilai rata-rata 12,31%. Nilai tertinggi angka permintaan pendidikan tinggi dicapai oleh Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 44,20% sedangkan angka permintaan pendidikan tinggi terendah dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2006 sebesar 3,67%. Pada variabel biaya pendidikan (*Tuition*), Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 memiliki angka yang paling tinggi sebesar Rp24.465.374,00. Sedangkan untuk angka terendah sebesar Rp2.206.200,00 dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2006. Untuk variabel pendapatan masyarakat (*Income*) angka terbesar dicapai oleh provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dengan tingkat pendapatan sebesar Rp47.774.770,00 dan tingkat pendapatan terendah sebesar Rp2.274.050 dimiliki oleh Provinsi Gorontalo tahun 2006. Untuk variabel tingkat pengangguran pendidikan tinggi, Provinsi Lampung pada tahun 2011 mencapai nilai yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebanyak 51,11% dari jumlah penduduk provinsi tersebut, sedangkan nilai tingkat pengangguran terendah berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 yaitu sebesar 1,55%. Pada variabel jumlah pekerja tingkat universitas angka tertinggi diraih oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 sebesar 54,88% terhadap jumlah penduduk provinsi tersebut dan angka terendah sebesar 6,31% diraih oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006. Untuk variabel tingkat lulusan sekolah menengah, persentase tertinggi sebesar 100% diraih oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2013 dan

persentase terendah dicapai oleh Provinsi Maluku Utara tahun 2006 yaitu sebesar 72.3% (Lampiran 1).

Berikut ini juga disajikan deskripsi data berupa grafik dari perkembangan masing-masing variabel.

1. Permintaan Pendidikan Tinggi

Tingkat permintaan pendidikan tinggi yang digambarkan dengan angka partisipasi murni pendidikan tinggi di Indonesia selama tahun 2006-2012 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 ke 2012 sebesar 3.46%, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi mulai meningkat dan juga mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi pun mulai meningkat. Ekspansi pendidikan ini juga disebabkan oleh semakin meningkatnya institusi-institusi jasa pendidikan tinggi oleh institusi-institusi swasta.



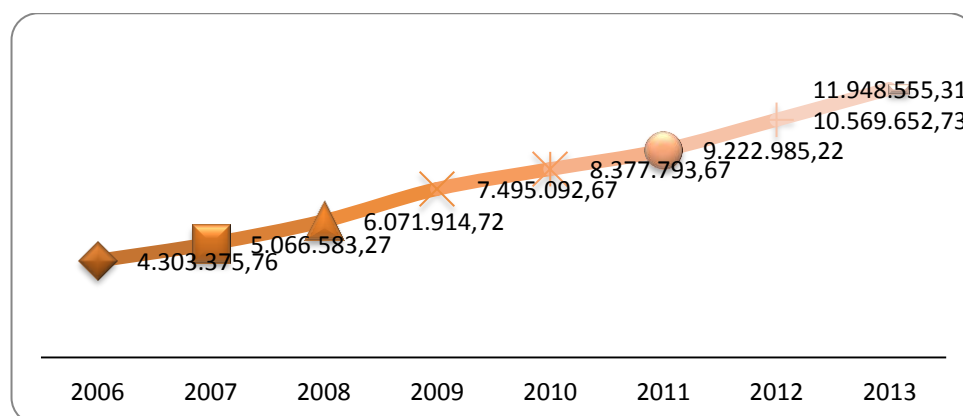
Gambar 4. Perkembangan Tingkat Partisipasi Pendidikan Tinggi

Sumber: Data BPS

Pemerintah pusat saat ini sudah meningkatkan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN. Sejak tahun 2010 kementerian pendidikan dan kebudayaan juga telah membuat sejumlah program beasiswa yang ditargetkan pada siswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik, diantaranya program tersebut dinamakan beasiswa BidikMisi. Selain itu ketersediaan fasilitas pendidikan juga terus dievaluasi dan dikembangkan Hal tersebut diantaranya yang membuat tingkat pasrtisipasi sekolah usia 19-24 tahun meningkat setiap tahunnya.

2. Biaya Pendidikan

Pada variabel biaya pendidikan di Indonesia juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena adanya peningkatan inflasi setiap tahunnya yang mengakibatkan harga-harga naik termasuk harga pendidikan. Berikut adalah rata-rata biaya pendidikan di 33 Provinsi Indonesia setiap tahunnya:



Gambar 5. Perkembangan Biaya Pendidikan Tinggi

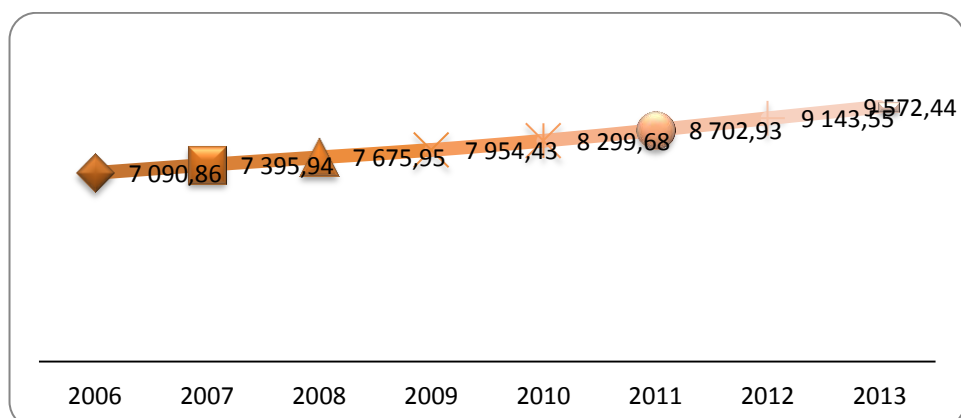
Sumber: Data BPS

Biaya pendidikan tinggi di Indonesia memiliki tren selalu naik namun relatif stabil. Provinsi yang memiliki rata-rata biaya pendidikan tertinggi

tahun 2006-2013 adalah provinsi Kepulauan Riau dengan nilai rata-rata sebesar Rp9,765,445.30. Kemudian di urutan kedua ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp7,720,656.25. Kedua provinsi tersebut ternyata memiliki jumlah Pdrb per Kapita yang paling tinggi se-indonesia. Jadi, tidaklah mengherankan jika biaya-biaya di kedua provinsi tersebut tinggi termasuk biaya pendidikan. Secara umum untuk biaya pendidikan ini tidak mendominasi pada satu pulau saja atau tidak terjadi ketimpangan antar pulau di Indonesia.

3. Pendapatan Masyarakat

Selain tingkat permintaan pendidikan tinggi dan biaya pendidikan yang mengalami peningkatan, untuk variabel pendapatan masyarakat (PDRB per Kapita) juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata pendapatan masyarakat di 33 Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan yang relatif konstan tiap tahunnya dengan laju perumbuhan rata-rata berada pada kisaran angka 4%.



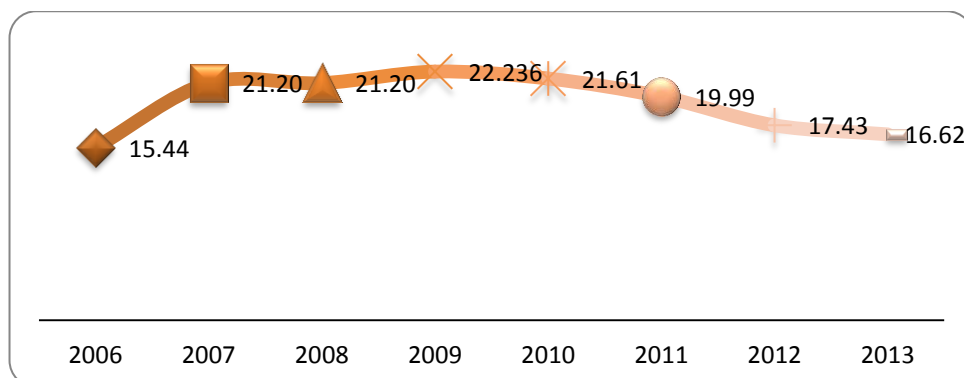
Gambar 6. Perkembangan Tingkat Pendapatan Masyarakat (PDRB per Kapita)

Sumber: Data BPS

Selama 8 tahun terakhir provinsi yang memiliki rata-rata PDRB per Kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp40.504.580,00 hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. Selain DKI Jakarta provinsi lainnya yang memiliki PDRB per Kapita yang besar biasanya dimiliki oleh provinsi yang memiliki industri pertambangan sebagai sektor utama perekonomian terdapat di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua.

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran lulusan universitas secara nasional di seluruh provinsi Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2006-2008, namun tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan akan tetapi persentasenya hanya berkisar 1,5% saja. Adanya keterbatasan lapangan kerja dan tidak siapnya lulusan universitas masuk dalam dunia kerja menjadi salah satu penyebabnya.

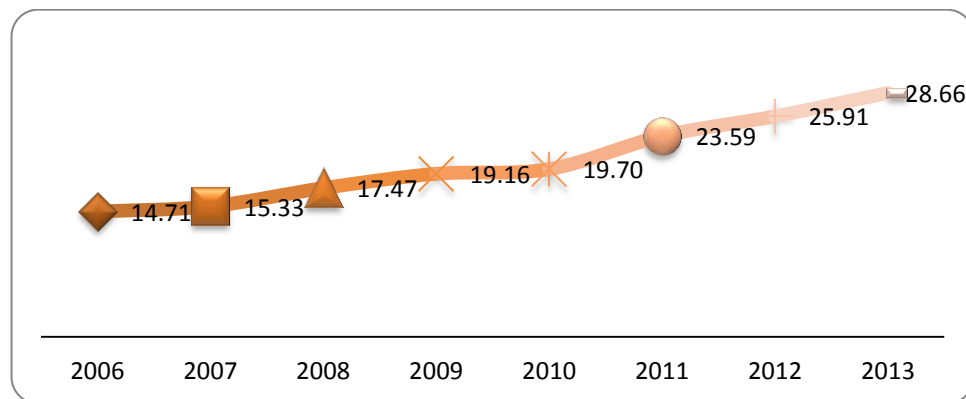


Gambar 7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Universitas

Sumber: Data BPS

5. Pekerja Tingkat Universitas

Pada grafik di bawah dapat dilihat bahwa jumlah pekerja lulusan universitas mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2006-2013 jumlahnya relatif konstan atau stabil berkisar pada angka 2,5% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 3,88%.



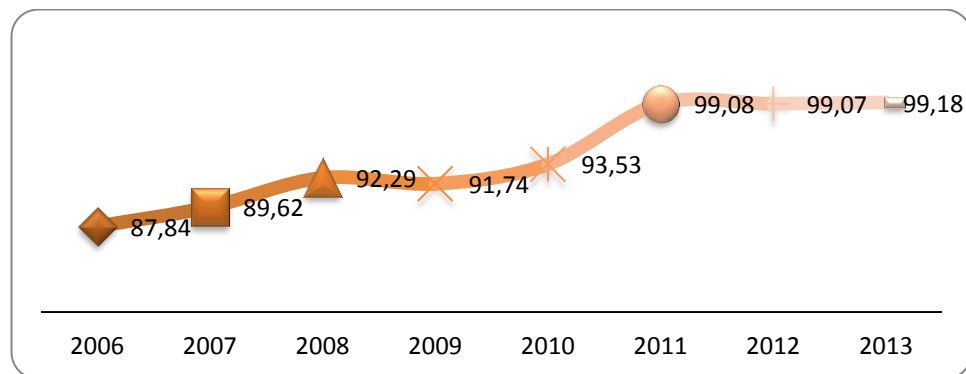
Gambar 8. Perkembangan Pekerja Tingkat Universitas

Sumber: Data BPS

Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran lulusan universitas yang mengalami penurunan, ternyata presentase kenaikan pekerja tingkat universitas memiliki persentase yang lebih besar. Hal ini berarti bahwa para lulusan universitas lebih banyak yang terserap di dunia kerja.

6. Tingkat Lulusan Sekolah Menengah

Perkembangan tingkat lulusan SMA/MA yang berada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama menuai hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2006-2013 angkanya tidak pernah dibawah 85% bahkan pada tahun 2012-2013 angkanya mencapai diatas 90%.



Gambar 9. Perkembangan Tingkat Lulusan Sekolah Menengah SMA/MA

Sumber: Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kesadaran masyarakat akan pendidikan mulai meningkat, hal ini diindikasikan banyaknya orang tua yang memberikan dukungan kepada anggota keluarganya yang bersekolah dengan mengikutsertakan mereka di lembaga bimbingan belajar di luar sekolah untuk lebih memperdalam pemahaman materi pelajaran di sekolah menengah atas. Selain itu peningkatan fasilitas pendidikan juga menjadi salah satu yang menyebabkan hasil tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Teknik Estimasi Data Panel

Teknik estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* atau model *random effect*. Untuk menentukan model yang tepat maka dilakukan uji Hausman dengan probabilitas 5%. Hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *random effect*

H_a : *fixed effect*

Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima sehingga model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang tepat digunakan adalah model *random effect*.

Sebelum melakukan uji Hausman, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model *fixed effect* atau *pooled least square* dengan menggunakan uji Likelihood Ratio dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *pooled least square*

H_a : *fixed effect*

Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima dan model yang tepat untuk digunakan adalah *fixed effect* dan sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga model yang terbaik digunakan adalah model *pooled least square*. Hasil pengujian pemilihan model *fixed effect* atau *pooled least square* dengan menggunakan uji Likelihood Ratio dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	62.936711	(32,217)	0.0000
Cross-section Chi-square	594.225615	32	0.0000

Sumber: Lampiran 3

Dari hasil uji Likelihood Ratio diketahui bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 maka sesuai hipotesis H_a diterima atau H_0 ditolak, jadi model yang digunakan adalah model *fixed effect*.

Namun untuk perbandingan dalam menentukan model mana yang paling tepat digunakan selanjutnya dilakukan uji Hausman. Hasil uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.990116	5	0.0001

Sumber: Lampiran 3

Menurut hasil uji Hausman pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 maka sesuai hipotesis yang ada H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang terbaik adalah model *fixed effect*. Berikut adalah hasil persamaan regresi setelah terpilih model *fixed effect*:

Tabel 9. Hasil Regresi Data Panel

Variabel Terikat: ENROLL	Persamaan		
Variabel Bebas	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Log Tuition	-0,149826	-0,213227	0,8314
Log Income	12,06926	5,083132	0,0000***
Unemp	1,580370	4,292333	0,0000***
PIW	0,034019	1,358582	0,1757*
HighGrades	0,153199	3,544152	0,0005***
C	-107,2375	-7,316579	0,0000
Obs		255	
R-Squared		0,923	
F-Statistik		0,00000	

Sumber: Lampiran 10

Keterangan:

* = signifikan pada taraf 10%

** = signifikan pada taraf 5 %

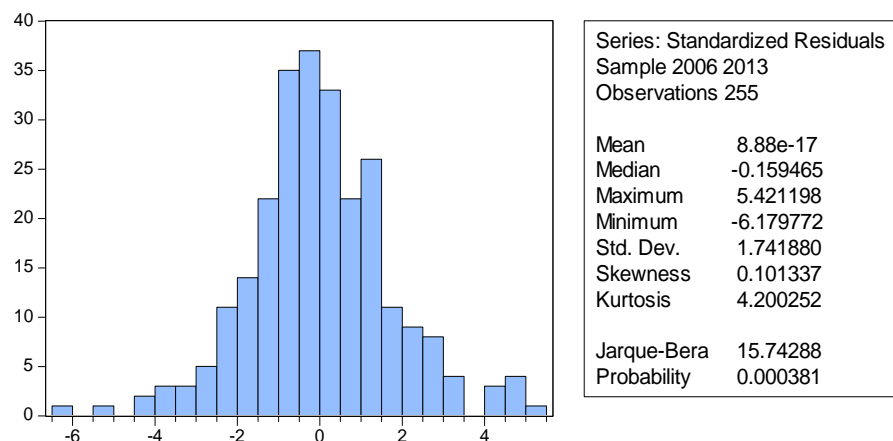
*** = signifikan pada taraf 1%

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa hasil estimasi tidak bias dan konsisten. Pengujian tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik deteksi Jarque-Bera (J-B test) seperti yang telah dipaparkan dalam bab III. Regresi linier yang normal diasumsikan bahwa probabilitas gangguan (*residual*) berdistribusi normal atau memiliki rata-rata sama dengan nol, sehingga data tidak *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati: 2009). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Hasil Uji Normalitas

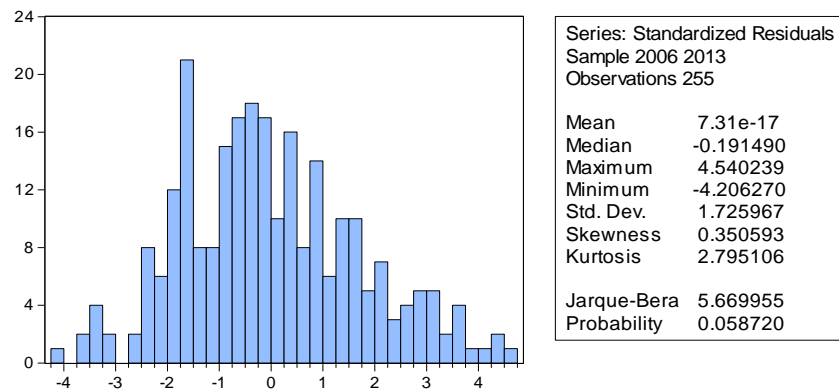
Sumber: Lampiran 5

Sesuai dengan teknik deteksi normalitas J-B test, bahwa probabilitas gangguan (*residual*) pada data akan berdistribusi

normal apabila nilai $J-B < X^2$ tabel. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai $J-B$ sebesar 15,74. sedangkan nilai X^2 tabel untuk variabel independen sebanyak 5 ($k=5$) adalah 9,48. Jadi dapat disimpulkan nilai $JB > X^2$ tabel hal ini memiliki arti bahwa residual berdistribusi tidak normal.

Metode OLS (*Ordinary Least Square*) yang digunakan dalam penelitian ini mengestimasi bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai varians *residual/error* yang sama. Namun pada kenyataannya tidak semua variabel memiliki nilai varians *error* dan probabilitas yang sama atau mendominasi salah satu variabel saja dan menjadikan data menjadi *unbiased* serta kesimpulan yang akan diambil dapat salah diinterpretasikan. Langkah yang dapat digunakan untuk membuat nilai varians *error* menjadi konstan adalah dengan cara mentransformasikan metode OLS menjadi metode GLS (*Generalized Least Square*)/EGLS (*Estimated Generalized Least Square*) dimana nilai varians eror yang mendominasi observasi akan menjadi relatif lebih kecil dan data menjadi BLUE dengan cara terboboti atau *cross section weighted* (Gujarati: 2009).

Berikut adalah hasil uji normalitas setelah metode yang digunakan sudah ditransformasikan menjadi EGLS (*Estimated Generalized Least Square*).



Gambar 11. Hasil Uji Normalitas EGLS

Sumber: Lampiran 6

Nilai J-B setelah metode ditransformasikan menjadi GLS sebesar 5,66 atau lebih kecil dari nilai X^2 untuk $k = 5$ sebesar 9,48. Jadi, data dalam penelitian ini lolos asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan antar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan korelasi bivariat:

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinieritas Korelasi Bivariat

	HIGH GRADES	LOG (INCOME)	PIW	UNEMP	LOG (TUITION)
HIGHGRADES	1	-	-	-	-
LOG(INCOME)	0,247	1	-	-	-
PIW	0,49	0,17	1	-	-
UNEMP	-0,01	-0,02	-0,02	1	-
LOG(TUITION)	0,69	0,48	0,46	-0,04	1

Sumber: Lampiran 7

Sesuai dengan *rule of thumb* korelasi bivariat bahwa korelasi antar variabel bebas dikatakan tinggi apabila memiliki nilai $> 0,9$ (Gujarati: 2009). Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel di

atas dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas terhindar dari asumsi multikolinieritas karena seluruh variabel bebas memiliki korelasi dibawah 0,9.

c. Uji Heteroskedastisitas

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab III, untuk melakukan uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park dimana variabel terikat diganti dengan menggunakan log residual². Berikut adalah hasil dari uji Park:

Tabel 11. Hasil Uji Park

Variabel Terikat: Log Residual ²	
Variabel Bebas	Probabilitas
Log Tuition	0.5437
Log Income	0.8166***
Unemp	0.3835***
PIW	0.2356*
HighGrades	0.4439***

Sumber: Output Eviews 6 (Lampiran 8)

Keterangan:

* = signifikan pada taraf 10% ** = signifikan pada taraf 5 %
 *** = signifikan pada taraf 1%

Rule of thumb yang digunakan dalam uji Park adalah data penelitian dikatakan lolos asumsi heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih dari tingkat signifikansi yang digunakan. Hasil pada tabel di atas seluruh variabel bebas memiliki nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikansi yang digunakan. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas di dalam model.

3. Pengujian Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun parsial berdasarkan taraf signifikansi yang digunakan.

Hasil uji F dan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil Regresi Data Panel EGLS

Variabel Terikat:	Persamaan		
Enroll	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Variabel Bebas			
Log Tuition	-0,151604	-0,279072	0,7805
Log Income	11,57127	6,412539	0,0000***
Unemp	1,784235	5,751878	0,0000***
PIW	0,039905	1,850122	0,0657*
HighGrades	0,119361	3,510692	0,0005***
C	-99,82922	-9,157598	0,0000
Obs		255	
R-Squared		0,91735	
F-Statistik		0,000000	

Sumber: Lampiran 10

Keterangan:

* = signifikan pada taraf 10% ** = signifikan pada taraf 5 %

*** = signifikan pada taraf 1%

Dari tabel 12 maka dapat disimpulkan:

a. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian koefisien regresi secara simultan digunakan untuk melihat pengaruh dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Dengan taraf signifikan yang digunakan sebesar 5%,

Persamaan regresi yang ditemukan dan digunakan untuk menguji pengaruh dari keseluruhan variabel bebas yaitu biaya pendidikan

(*Tuition*), pendapatan masyarakat (*Income*), tingkat pengangguran (*Unemp*), pekerja tingkat universitas (*PIW*) dan tingkat lulusan sekolah menengah (*HighGrades*) terhadap variabel terikat, pada tabel didapatkan hasil probabilitas F-Statistik sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini keseluruhan variabel bebas bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Dengan hasil ini maka hipotesis yang telah dipaparkan dalam bab II pada HI (6) diterima.

b. Pengujian Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas secara individu mampu menerangkan dan mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh dan signifikan apabila nilai probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 12 ditemukan hasil bahwa empat variabel bebas yaitu pendapatan masyarakat (*Income*), tingkat pengangguran (*Unemp*), pekerja tingkat universitas (*PIW*) dan tingkat lulusan sekolah menengah (*HighGrades*) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Namun, satu variabel bebas biaya pendidikan (*Tuition*) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas secara

statistik. Nilai R^2 pada hasil regresi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,9173 (lampiran 10). Dengan hasil tersebut maka variabel terikat dapat dijelaskan sebesar 91,73% oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian sedangkan sisanya sebesar 8,264% dijelaskan oleh variabel lainnya.

C. Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasinya

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan dengan teknik data panel digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas biaya pendidikan, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia periode tahun 2006-2013.

Persamaan hasil regresi adalah sebagai berikut:

$$\text{ENROLL} = -99.829 - 0.151\text{LOG}(\text{TUITION}) + 11.571\text{LOG}(\text{INCOME}) \\ + 1.784 \text{UNEMP} + 0.039 \text{PIW} + 0.119 \text{HIGHGRADES}$$

Menurut hasil regresi, angka koefisien biaya pendidikan (*Tuition*) ditemukan sebesar -0,151 namun tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal ini berbeda dengan apa yang telah menjadi hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya. Variabel biaya pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah permintaan pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Carl C. Brown tahun 2012 dan penelitian yang dilakukan oleh Mahardynastika Hapsari tahun 2011 juga memiliki hasil yang sama.

Pada pasar pendidikan tinggi, para konsumen atau masyarakat tidak memiliki daya tawar terhadap harga yang telah ditetapkan. Posisi konsumen dalam menghadapi harga pendidikan tinggi ini hanya sebatas *take it or leave it*. Pemerintah saat ini telah memberikan banyak program beasiswa kepada

para mahasiswa sehingga bagi mereka yang berada di kelas ekonomi bawah pun dapat mengenyam pendidikan tinggi. Sementara bagi mereka yang berada di kelas ekonomi atas akan tetap mendafatarkan anggota keluarganya pada pendidikan tinggi selain karena biasanya kalangan ini memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan juga untuk memenuhi tuntutan kelas sosial mereka.

Di negara maju masyarakatnya sangat memperhitungkan *opportunity cost* dalam membuat keputusan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sementara di negara berkembang seperti di Indonesia pendidikan tinggi hanya sebagai batu pijakan untuk memperbaiki taraf hidup tanpa memperhitungkan *opportunity cost*-nya. Meskipun biaya pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan pendidikan tinggi, namun koefisien regresi yang telah didapatkan bisa digunakan untuk menginterpretasikan nilai elastisitas karena model yang digunakan adalah model semilog. Nilai koefisien dari variabel biaya pendidikan memperlihatkan nilai elastisitas harga (*price elasticity of demand*). Sifat elastisitas dari komoditi pendidikan tinggi adalah inelastis dimana nilai mutlaknya kurang dari 1. Jadi, permintaan pendidikan tinggi tidak responsif terhadap perubahan harga.

Selanjutnya untuk variabel pendapatan masyarakat (*Income*) dalam penelitian ini ditemukan hasil koefisien sebesar 11,571 signifikan pada taraf signifikansi 5%. Tanda positif pada variabel pendapatan masyarakat menunjukkan pengaruh positif terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan

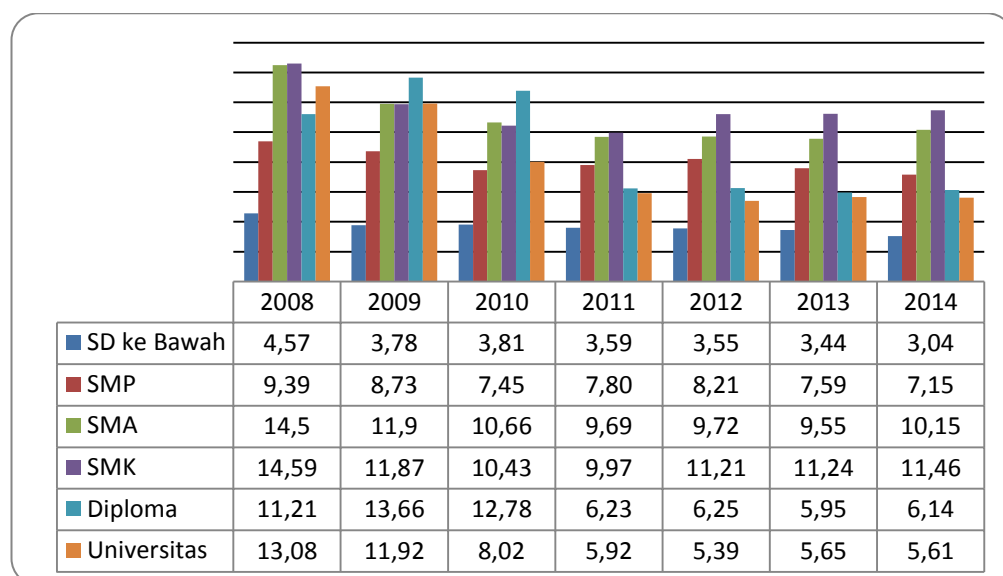
masyarakat sebesar 1% akan meningkatkan jumlah permintaan pendidikan tinggi sebesar 11,57%. Koefisien tersebut juga menunjukkan jenis elastisitas pendapatan (*income elasticity of demand*) dari komoditi pendidikan tinggi. Sesuai dengan kriterianya pendidikan tinggi termasuk ke dalam golongan barang mewah karena koefisien elastisitas bertanda positif (+) diatas 1.

Hasil di atas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Clotfelter (1991) yang menemukan hasil bahwa pendidikan tinggi merupakan komoditi dengan elastisitas pendapatan yang tinggi (*highly income-elastic commodity*). Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, permintaan pendidikan tinggi juga akan meningkat. Nilai elastisitas pendapatan yang tinggi pada komoditas pendidikan tinggi bisa dipandang sebagai satu sisi positif sekaligus sebagai sisi negatif. Sisi positifnya adalah menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pendidikan semakin meningkat. Namun disisi lain karena nilai elastisitas pendapatan yang tinggi hal ini juga menandakan bahwa proporsi pendapatan yang digunakan untuk pendidikan akan semakin besar dan mengurangi untuk proporsi kebutuhan lainnya.

Untuk hasil pada variabel tingkat pengangguran (Unemp) memiliki koefisien sebesar 1.784235. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran lulusan jenjang pendidikan tinggi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan jumlah permintaan pendidikan tinggi sebesar 1,78%. Hoenack dan Weiler dalam Clotfelter (1991) dalam penelitiannya yang dilakukan tahun 1979 juga menemukan hasil yang sama. Permintaan pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap *opportunity cost* dalam mengenyam

pendidikan tinggi yang direpresentasikan oleh tingkat pengangguran. Jadi, pengaruh tingkat pengangguran terhadap permintaan pendidikan tinggi seharusnya memiliki koefisien yang positif.

Berdasarkan data dari BPS, persentase tingkat pengangguran menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan paling tinggi selama 7 tahun terakhir adalah pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas umum atau kejuruan.



Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (%)

Sumber: Data BPS

Para lulusan sekolah menengah atas sebagai konsumen pendidikan tinggi mengalami sebuah dilemma. Maju kena mundur kena, jika para lulusan sekolah menengah ini tidak melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan dan akan menambah jumlah pengangguran tingkat SMA. Jadi, para lulusan sekolah menengah atas ini akan cenderung meneruskan pendidikannya ke pendidikan tinggi dengan harapan mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah di masa yang akan

datang meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka juga akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Terlebih lagi saat ini banyak institusi-institusi perguruan tinggi swasta yang berkembang dengan pesat sehingga lulusan sekolah lebih mudah untuk masuk dalam pendidikan tinggi.

Tingginya tingkat pengangguran merupakan suatu hal yang biasa terjadi di negara berkembang yang sedang mengalami transisi menuju masyarakat industri dimana perkembangan lapangan kerja lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan tingkat tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi bukanlah kesalahan dari pendidikan melainkan ketika sektor pendidikan sudah berkembang disisi lain sektor ketenagakerjaan belum berubah (Sanisah: 2010).

Pada variabel pekerja tingkat pendidikan tinggi/universitas (*PIW*) memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,039 pada taraf signifikansi 10%, hasil tersebut memiliki arti bahwa setiap peningkatan jumlah pekerja tingkat universitas 1% akan menyebabkan permintaan pendidikan tinggi bertambah sebesar 0,039%. Hasil yang didapatkan ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Meullemester (1998) di Belgia. Kenaikan jumlah pekerja tingkat universitas akan menandakan adanya prospek yang bagus pada pekerjaan setelah lulus dari pendidikan tinggi dan membuat banyak orang akan termotivasi memasuki pendidikan tinggi.

Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu manfaat dari pendidikan tinggi adalah membentuk individu dengan *skill*, kompetensi dan *attitudes* yang baik sehingga dengan menggunakan ketiga hal tersebut mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Di

Indonesia sendiri saat ini sedang gencar penggalakkan program kewirausahaan, dengan adanya berbagai program kewirausahaan dari pemerintah maupun swasta untuk mahasiswa agar menjadi seorang *entrepreneur* sehingga mereka tidak perlu melamar pekerjaan namun merekalah yang membuka lapangan kerja dengan usaha yang dibangunnya.

Untuk variabel terakhir yaitu variabel tingkat lulusan sekolah menengah (*HighGrades*) pada hasil persamaan memiliki koefisien sebesar 0.11 atau dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan tingkat lulusan sekolah menengah sebesar 1% akan meningkatkan jumlah permintaan pendidikan tinggi sebesar 0,11%. Hasil yang didapatkan ini tidaklah mengherankan karena sesuai dengan hukum permintaan dimana siswa lulusan sekolah menengah ini merupakan konsumen dari komoditi pendidikan tinggi. Jadi, ketika jumlah konsumen bertambah maka jumlah permintaan akan barang/jasa tersebut juga akan naik dan sebaliknya.

Adanya peningkatan kualifikasi syarat pendaftaran kerja dan adanya perbedaan upah yang akan diterima sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh menjadi hal yang menyebabkan adanya pengaruh di atas. Pada 10 tahun yang lalu lulusan sekolah menengah pertama masih bisa dengan mudah melamar pekerjaan namun seiring berjalannya waktu syarat yang ditetapkan oleh banyak perusahaan juga meningkat dan menyebabkan masyarakat untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2006-2013 ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan.

1. Tidak terdapat pengaruh dari variabel biaya pendidikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia karena hasil yang tidak signifikan.
2. Variabel pendapatan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia dengan koefisien regresi berganda sebesar 11,57. Hal ini memiliki arti jika pendapatan masyarakat naik sebesar 1% akan diikuti oleh naiknya permintaan pendidikan tinggi sebesar 11,57%.
3. Variabel tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia dan mendapatkan hasil koefisien regresi sebesar 1,7. Jadi, ketika tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi naik sebesar 1% akan membuat permintaan pendidikan turun sebesar 1,7%.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah pekerja tingkat universitas terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia. Koefisien regresi didapatkan sebesar 0,03 hal ini berarti bahwa jika jumlah pekerja tingkat universitas naik sebesar 1% akan diikuti oleh naiknya permintaan pendidikan tinggi sebesar 0,03%.
5. Variabel tingkat lulusan sekolah menengah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,11. Jadi, jika tingkat lulusan sekolah menengah naik sebesar 1% akan menaikkan jumlah permintaan pendidikan tinggi sebesar 0,11% dan sebaliknya.
6. Empat variabel bebas antara lain pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, jumlah pekerja tingkat universitas dan tingkat lulusan sekolah menengah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia sedangkan variabel biaya pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.
7. Dilihat dari jenis elastisitas harganya, pendidikan tinggi memiliki sifat inelastis karena koefisien sebesar 0,15 atau kurang dari 1, hal tersebut berarti pendidikan tinggi tidak peka terhadap harga. Sedangkan menurut elastisitas pendapatan, pendidikan tinggi termasuk dalam golongan barang mewah karena nilai koefisiennya bertanda positif (+) lebih dari 1 dengan koefisien sebesar 1,78.

B. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan diatas rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk pemerintah terkait dengan permintaan pendidikan tinggi di Indonesia adalah:

1. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi terutama bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Kalaupun pemerintah saat ini sudah memberikan banyak program beasiswa untuk siswa kurang mampu maka akan lebih baik jika target yang diberikan tepat sasaran tidak hanya sekedar formalitas program saja.
2. Pemerintah harus mengembangkan jumlah lapangan pekerjaan untuk bisa mengurangi jumlah pengangguran. Bantuan berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta sangat diperlukan untuk mendukung mahasiswa yang ingin menjadi *entrepreneur* sehingga mereka tidak perlu lagi untuk melamar pekerjaan pada perusahaan atau BUMN namun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan usaha yang dibangunnya sendiri.
3. Melihat dari hasil penelitian didapatkan bahwa menurut nilai koefisiennya variabel pendapatan masyarakat merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi, pemerintah harus lebih mendorong perekonomian supaya

masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi pula supaya mereka lebih mudah untuk mengakses pendidikan tinggi.

4. Meskipun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah naik menjadi 20% namun jumlah ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di kawasan ASEAN. Jadi, ada baiknya pemerintah membuat perencanaan keuangan kembali yang lebih matang dan menaikkan anggaran untuk sektor pendidikan.

C. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini maka saran bagi penelitian selanjutnya pada bidang permintaan pendidikan tinggi adalah:

1. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup selama 8 tahun, untuk memaksimalkan hasil penelitian selanjutnya para peneliti dapat menambah rentang waktu yang digunakan.
2. Penelitian ini menggunakan data dari 33 Provinsi di Indonesia namun tidak dibedakan antar provinsi. Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan analisis yang membedakan tiap provinsi hal ini disebabkan karena setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
3. Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat permintaan pendidikan tinggi yang diproyeksikan dengan angka partisipasi murni pendidikan tinggi padahal ada proyeksi lain yang lebih baik yaitu tingkat pendaftaran pada tiap universitas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan data yang

tidak dipublikasikan oleh Kemdikbud dan Dikti. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya para peneliti untuk menggunakan data jumlah pendaftar pada tiap universitas untuk memaksimalkan hasil penelitian.

4. Variabel biaya pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa biaya langsung saja. Akan lebih baik jika pada penelitian selanjutnya juga memasukkan biaya tidak langsung karena hal tersebut juga mempengaruhi keputusan masyarakat akan permintaan terhadap pendidikan tinggi.
5. Pada penelitian ini menggunakan variabel tingkat lulusan sekolah SMA/MA pada masing-masing provinsi. Sedangkan seperti yang diketahui bahwa tidak semua lulusan SMA/MA melanjutkan di pendidikan tinggi pada provinsi yang sama dengan provinsi dimana mereka mengenyam SMA/MA. Jadi, sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan data dimana sudah diplotkan lulusan SMA/MA menurut provinsi dimana dirinya mendaftar pendidikan tinggi.
6. Pada penelitian ini menggunakan variabel yang lebih bersifat ekonomi sedangkan keputusan masyarakat mendaftar pada pendidikan tinggi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Jadi, pada penelitian selanjutnya untuk memasukan variabel dari faktor sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS.go.id. *Indikator Ekonomi dan Perdagangan/PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Konstan menurut Provinsi di Indonesia*
- ____.go.id. *Indikator Pendidikan/Angka Partisipasi Sekolah*
- ____. 2005. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2006. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2007. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2008. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2009. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2010. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2011. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2012. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2013. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2006. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2007. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2008. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2009. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2010. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2011. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2012. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2013. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2014. *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BPS.
- ____. 2006. *Statistik Pendidikan: Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- ____. 2009. *Statistik Pendidikan: Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- ____. 2012. *Statistik Pendidikan: Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.

- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga
- Brown, Carl C. *et al.* 2012. Determinants of Student Demand at Florida Southern College. *Journal of Case Research in Business and Economics*. Vol 4, 1-9.
- Brunello, Giorgio. 2001. Unemployment, Education and Earnings Growth. *IZA Discussion Paper No. 311*, 1-10.
- Chen, Dandan *et al.* 2010. *Indonesia: Higher Education Financing*. Jakarta: Bank Dunia
- Cohn, Elchanan. 1979. *The Economics of Education*. South Carolina: University South Carolina
- Clotfelter, Charles. T. *et al.* 1991. *Economics Challenges in Higher Education*. Chicago: University of Chicago Press diakses dari <http://www.nber.org/chapter/c6080> pada tanggal 5 November 2014 pukul 11.30 WIB.
- Data.worldbank.org/Education Indicators/Expenditure per Student, Tertiary (% of GDP per capita)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Ikhtisar Data Pendidikan Nasional tahun 2005/2006*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Ikhtisar Data Pendidikan Nasional tahun 2006/2007*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Ikhtisar Data Pendidikan Nasional tahun 2007/2008*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2009. *Perspektif Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Gujarati, Damodar., & Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. New York: Mc Graw Hill.
- Halak. J. 1969. *The Analysis of Educational cost and Expenditure*. Netherlands: Unesco.
- Hapsari, Mahardynastika N., & Tyas Danarti H. 2011. Kajian Respon Pendidikan Tinggi terhadap Kenaikan Biaya Kuliah dan Pendapatan Masyarakat di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol.*

1 No.1 diakses dari <http://JIMFEB.UB.ac.id> pada tanggal 3 September 2014 pukul 15:25 WIB.

- Harvey, Lee. 2000. New Realities: The Relationship Between Higher Education and Employment. *Tertiary Education and Management Voll. VI, 3-17*.
- Iksan, Arrahman. 2012. *Mahalnya Biaya Kuliah di Indonesia* diakses dari <http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/02/mahalnya-biaya-kuliah-di-indonesia-435725.html> pada tanggal 21 Maret 2015 pukul 00.02 WIB.
- Kemenerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Ikhtisar Data Pendidikan tahun 2009/2010*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2011/2012*. Jakarta: Kemdikbud
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2009. *Iktisar Data Pendidikan*. Jakarta: Kemdiknas.
- Mankiw, Gregory N. 2004. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Markote, Dave E., & Steven W. Helmet. 2008. Rising Tuition and Enrollment in Public Higher Education. *IZA Discussion Paper No. 3827*.
- Meulemeester, J.L De. 1998. Demand for University Education in Belgium: on the Relative Importance of Economic and Cultural Determinants. *Economic of Education Review Vol. VII, 2, 211-218*.
- Notodihardjo, Hardjono. 1990. *Pendidikan Tinggi dan Tenaga Kerja Tingkat Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nwadiani. 2000. *Economic Dimension of Educational Planning: Theory and Practice*. Benin-City: Monose Pub.
- Olney, Martha L. 2009. *Microeconomics: as a Second Languange*. Berkeley: Courier Westford.
- PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Indonesia
- Pandit, H. M. 1981. Cost of Education in Nigeria. *Mimeograph*. Departement of Educational Management: University of Ibadan.
- Rahmanta. 2009. *Aplikasi Eviews dalam Ekonometrika*. Medan: Universitas Sumatera Selatan.

- Sanisah, siti. 2010. Pendidikan Tinggi dan Pengangguran Terbuka: Sebuah Dilema. *Lentera Pendidikan, Vol. 13, No 2, 147-159.*
- Sugiyono .2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD.* Bandung: Alfabeta.
- Suhardan, Dadang. et al. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Tilak, Jandhyala B. G. 2008. Higher Education: a Public Good or a Commodity for Trade? *prospect, Vol 38, 449-446.*
- Triatmojo, Bambang. 2013. *Uang Kuliah Tunggal* diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2013/02/20/1521594/Uang.Kuliah.Tunggal> pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 23.46 WIB.
- Todaro, Michael P., & Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid I.* Jakarta: Erlangga.
- UU No 2 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Vieira, Carlos Rodrigues., & Isabel Viegas Vieira. 2011. Determinants and Projections of Demand for Higher Education in Portugal. *CEFAGE-UE Working Paper, Vol 15.*
- Wijatno, Serian. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi secara Efisien, Efektif dan Ekonomis.* Jakarta: Salemba Empat.
- World Bank. 2014. *World Bank and Education in Indonesia* diakses dari <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia>. Pada tanggal 3 desember 2014 pukul 15.34 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

No	Provinsi	Tahun	Enroll (APM) (%)	PIW (Pekerja Tingkat Universitas) (Rp)	Income (PDRB per Kapita) (Rp)	Tuition (Rp)	HighGrades (%)	Unemp (Tingkat Universitas) (%)
1	Aceh	2006	15.61	16.1	5,976.70	2,505,600.00	89.2	13.91
		2007	18.26	18.43	6,314.38	3,448,707.84	90.3	27.57
		2008	17.79	20.97	6,296.28	5,093,051.74	93.4	27.57
		2009	17.48	23.41	6,402.16	6,294,042.00	92.8	18.95
		2010	18.77	24.88	6,427.40	6,890,947.66	86.6	30.42
		2011	22.34	27.7	6,652.08	7,322,718.94	99.5	20.55
		2012	22.97	30.49	6,912.07	7,987,440.00	95.8	14.00
		2013	21.23	30.11	7,137.52	9,361,992.33	96.9	13.65
2	Sumatera Utara	2006	9.82	13.39	7,427.09	4,510,800.00	93.9	18.31
		2007	11.02	13.37	7,851.04	5,062,019.76	94.9	25.75
		2008	11.20	15.29	8,263.33	5,730,206.37	93.8	25.75
		2009	11.28	15.92	8,594.67	6,762,036.00	98.3	33.58
		2010	12.25	16.92	9,055.34	7,843,961.76	98.6	26.04
		2011	13.54	19.76	9,515.62	8,419,708.55	99.9	18.77
		2012	18.08	24.16	9,971.72	10,082,420.00	99.9	19.62
		2013	16.45	27.69	10,431.66	11,796,672.66	99.4	14.93
3	Sumatera Barat	2006	14.40	17.26	6,703.33	3,544,400.00	88.7	20.95
		2007	16.99	14.77	7,033.59	4,021,476.24	90.3	31.67
		2008	17.33	18.28	7,419.04	5,074,298.72	92.3	31.67
		2009	16.69	18.27	7,636.47	7,743,346.00	93.1	32.54
		2010	17.37	20.13	7,987.56	8,515,654.27	94.1	33.09

		2011	20.06	14.541	8,370.65	9,348,838.29	99.2	38.14
		2012	23.16	16.976	8,784.84	9,935,200.00	98.6	16.82
		2013	23.26	13.786	9,205.66	11,704,752.96	99.7	20.51
4	R i a u	2006	8.38	13.64	7,512.51	3,865,400.00	90.0	14.51
		2007	9.49	12.42	7,848.99	5,029,658.48	91.5	27.04
		2008	9.82	16.9	8,187.94	5,419,959.98	93.3	27.04
		2009	9.19	18.09	8,424.02	7,493,284.00	94.0	40.62
		2010	10.07	18.34	8,725.66	8,270,563.99	94.4	32.85
		2011	11.39	21.66	9,154.37	9,502,376.75	99.9	17.94
		2012	17.61	27.92	9,617.51	12,317,820.00	99.4	3.08
		2013	12.87	31.33	9,945.97	12,721,766.25	99.6	3.09
5	Kepulauan Riau	2006	3.90	14.98	21,934.72	7,241,600.00	93.2	7.27
		2007	5.52	14.36	22,472.35	7,828,170.00	94.2	18.15
		2008	8.93	22.75	22,952.33	8,122,508.78	91.6	18.15
		2009	5.01	15.61	22,672.19	9,103,210.00	99.1	13.66
		2010	6.58	9.91	23,245.15	10,850,361.64	99.4	7.88
		2011	7.61	22.52	24,057.57	15,401,966.64	98.7	12.86
		2012	12.32	15.59	24,909.74	19,616,240.00	97.9	10.65
		2013	9.11	14.269	25,665.05	24,465,374.52	99.5	13.93
6	Jambi	2006	8.03	17.463	4,261.92	4,014,400.00	88.1	13.92
		2007	9.93	12.97	4,428.41	4,908,005.44	89.8	19.51
		2008	10.39	14.84	4,636.13	6,611,574.13	92.0	19.51
		2009	9.45	19.02	4,837.10	8,288,888.00	91.7	13.17
		2010	10.43	9.63	5,045.18	9,679,963.20	93.7	10.88
		2011	13.26	13.14	5,292.70	10,137,509.81	99.5	16.43

		2012	18.30	12.78	5,646.58	10,940,620.00	98.5	28.83
		2013	10.97	13.286	6,021.42	12,632,677.57	98.5	26.34
7	Sumatera Selatan	2006	7.89	7.83	5,599.29	3,761,000.00	86.5	29.06
		2007	9.58	12.91	5,938.81	4,889,300.00	88.6	34.09
		2008	9.84	12.95	6,199.19	6,514,992.25	91.7	34.09
		2009	9.15	14.47	6,395.46	8,161,590.00	90.6	39.77
		2010	9.61	16.662	6,725.17	8,772,076.93	93.9	17.82
		2011	10.29	18.96	7,157.47	9,382,563.86	99.9	16.84
		2012	10.46	18.59	7,609.60	11,262,580.00	99.3	18.24
		2013	11.49	25.46	8,049.08	12,471,372.20	99.8	23.30
8	Kep Bangka Belitung	2006	3.67	6.31	8,073.55	8,346,000.00	87.6	9.70
		2007	6.01	9.21	8,244.58	9,380,904.00	89.6	15.28
		2008	6.35	11.44	8,387.91	9,615,426.60	86.4	15.28
		2009	5.85	13.32	8,456.00	7,104,512.00	98.2	8.94
		2010	6.50	13.73	8,709.61	8,837,211.87	98.3	23.29
		2011	6.23	22.44	9,076.26	9,662,756.17	98.6	1.55
		2012	6.39	18.59	9,393.92	9,247,780.00	99.5	3.23
		2013	8.34	19.91	9,676.76	10,743,036.25	99.9	6.66
9	Bengkulu	2006	11.05	19.32	4,096.06	3,603,000.00	82.6	5.49
		2007	12.74	17.61	4,288.22	4,769,296.98	85.2	19.05
		2008	12.35	20.48	4,460.48	5,752,683.39	91.7	19.05
		2009	12.25	22.71	4,634.13	7,076,232.00	85.9	27.54
		2010	13.23	20.04	4,842.70	8,361,275.73	89.1	16.58
		2011	13.30	37.3	5,065.06	9,023,488.77	99.8	12.20
		2012	17.78	33.07	5,306.22	10,352,180.00	99.9	13.30

		2013	16.74	29.25	5,540.42	12,146,049.57	99.3	22.91
10	Lampung	2006	5.16	24.777	4,173.73	4,816,000.00	88.1	18.72
		2007	6.61	18.351	4,375.00	5,182,333.02	89.8	19.90
		2008	6.96	10.392	4,555.94	6,280,145.82	94.5	19.90
		2009	6.87	12.511	4,749.26	7,428,360.00	92.0	29.17
		2010	7.72	15.262	4,979.65	8,906,603.64	89.4	19.38
		2011	8.29	17.782	5,230.60	9,661,883.63	99.8	51.11
		2012	12.58	17.592	5,502.79	10,927,740.00	99.5	7.01
		2013	9.12	21.23	5,755.31	12,388,616.80	99.9	8.96
11	DKI Jakarta	2006	14.16	24.916	34,183.50	9,313,600.00	94.7	13.35
		2007	15.50	24.151	35,881.98	10,541,132.48	95.4	18.24
		2008	16.07	24.956	37,599.56	12,883,372.12	95.0	18.24
		2009	15.55	25.222	38,951.56	13,275,372.00	97.9	17.96
		2010	16.23	25.54	40,939.43	13,723,713.35	97.8	17.79
		2011	16.15	25.013	43,195.94	13,975,281.65	99.6	15.29
		2012	17.78	28.808	45,509.95	15,223,800.00	97.8	22.79
		2013	19.50	28.9	47,774.70	16,678,513.62	99.9	15.24
12	Jawa Barat	2006	7.11	13.99	6,199.48	6,386,400.00	91.5	16.75
		2007	8.43	14.35	6,500.64	8,607,963.87	92.7	22.61
		2008	8.77	17.11	6,786.22	9,303,702.14	95.4	22.61
		2009	8.24	18.91	6,934.11	10,021,750.00	94.9	25.79
		2010	8.61	19.2	7,245.23	10,756,344.28	93.2	33.04
		2011	9.38	18.37	7,613.76	11,201,656.93	99.9	19.39
		2012	14.46	23.23	7,988.92	12,192,440.00	99.9	18.36
		2013	8.55	24.79	8,355.29	12,782,393.46	100.0	23.03

13	Banten	2006	8.14	19.89	7,414.43	7,813,200.00	91.6	11.37
		2007	9.12	13.95	7,648.23	8,658,458.02	92.8	29.57
		2008	9.44	17.97	7,871.52	8,938,497.29	96.3	29.57
		2009	8.85	17.62	8,020.32	9,773,282.00	92.2	14.43
		2010	9.48	23.23	8,284.73	10,168,810.51	95.7	14.32
		2011	11.34	24.1	8,607.46	10,991,908.80	99.5	14.38
		2012	13.45	26.34	8,929.01	12,638,880.00	99.8	5.37
		2013	6.43	45.78	9,243.06	13,966,702.58	99.6	3.31
14	Jawa Tengah	2006	7.21	10.35	4,394.87	5,193,000.00	93.6	13.14
		2007	8.23	13.36	4,640.26	5,868,090.00	94.7	19.00
		2008	8.50	14.64	4,878.12	6,600,427.63	93.7	19.00
		2009	8.15	15.34	5,137.18	8,087,102.00	98.3	23.48
		2010	9.29	15.21	5,430.52	9,347,783.68	98.7	22.39
		2011	9.46	15.78	5,721.70	10,290,739.77	99.8	21.19
		2012	15.05	21.6	6,055.96	11,327,760.00	99.9	17.29
		2013	8.60	23.73	6,382.36	12,614,015.03	100.0	9.82
15	DI Yogyakarta	2006	38.58	24.03	5,262.83	5,129,600.00	91.8	14.75
		2007	42.25	23.909	5,432.75	5,527,656.96	93.0	15.60
		2008	42.34	32.3	5,648.40	6,343,539.13	95.1	15.60
		2009	42.17	24.306	5,839.38	8,181,048.00	94.7	15.52
		2010	42.90	34.37	6,068.96	9,434,531.33	95.2	16.53
		2011	43.04	24.335	6,305.35	10,741,862.80	99.3	29.98
		2012	44.20	24.762	6,561.24	12,640,340.00	99.4	29.90
		2013	36.91	26.503	6,834.07	14,602,722.52	99.9	38.18
16	Jawa Timur	2006	8.14	14.01	7,427.38	4,701,400.00	94.8	20.19

		2007	9.36	17.27	7,816.44	5,292,836.12	95.7	22.67
		2008	9.49	18.67	8,216.11	6,427,620.18	94.0	22.67
		2009	9.37	21.45	8,559.51	7,321,944.00	99.4	23.77
		2010	10.29	29.12	9,067.15	8,310,406.44	99.4	26.79
		2011	10.55	26.67	9,649.71	8,980,225.20	99.9	20.85
		2012	15.46	39.29	10,283.36	10,647,700.00	99.2	12.43
		2013	13.71	35.9	10,885.77	12,219,300.52	100.0	9.58
17	B a l i	2006	9.51	28.7	6,424.98	6,175,400.00	93.4	20.41
		2007	11.63	24.17	6,660.64	6,905,332.28	94.5	20.22
		2008	12.06	27.36	6,910.34	8,233,918.21	95.9	20.22
		2009	12.37	31.71	7,126.28	8,313,434.00	95.0	21.64
		2010	13.84	30.16	7,391.70	9,647,328.75	98.1	18.62
		2011	17.46	36.61	7,771.90	10,270,836.30	99.9	15.54
		2012	18.31	35.25	8,186.29	12,336,740.00	99.6	7.27
18	Nusa Tenggara Barat	2006	9.85	12.81	3,616.00	2,544,800.00	87.6	10.33
		2007	11.77	12.96	3,748.82	2,990,648.96	89.5	8.72
		2008	11.53	14.48	3,810.30	3,768,815.82	91.8	8.72
		2009	11.34	16.95	4,223.88	4,969,432.00	92.5	12.31
		2010	12.32	20.7	4,444.72	6,069,664.24	93.8	17.87
		2011	13.92	27.99	4,263.21	7,744,891.58	99.7	19.73
		2012	18.73	24.97	4,157.39	8,786,220.00	99.2	15.22
		2013	15.12	30.67	4,334.10	10,415,185.19	99.8	10.79
19	Nusa Tenggara Timur	2006	5.58	7.21	2,388.95	2,488,600.00	77.6	15.69
		2007	8.38	8.17	2,460.60	2,960,690.00	80.7	12.68

		2008	8.34	8.88	2,527.42	3,267,006.97	88.6	12.68
		2009	6.52	10.94	2,582.90	4,982,520.00	79.9	16.32
		2010	8.40	11.43	2,666.02	5,761,453.96	89.1	18.24
		2011	11.36	18.86	2,767.46	6,250,025.26	94.5	13.04
		2012	16.32	20.36	2,867.82	9,176,480.00	97.7	16.44
		2013	10.22	18.2	2,976.62	9,830,232.64	98.3	5.74
20	Kalimantan Barat	2006	5.60	10	5,764.35	3,250,000.00	79.9	6.20
		2007	7.33	9.2	6,055.47	3,528,200.00	83.0	9.98
		2008	6.92	8.7	6,328.43	3,923,005.58	87.8	9.98
		2009	6.47	9.65	6,573.55	7,239,070.00	86.5	9.95
		2010	7.73	10.52	6,875.14	7,276,839.13	89.9	18.46
		2011	8.24	12.64	7,160.20	7,546,972.26	98.5	11.52
		2012	13.34	14.16	7,448.63	7,513,500.00	99.6	15.14
		2013	8.51	22.02	7,772.47	8,203,344.35	99.6	7.11
21	Kalimantan Tengah	2006	6.49	13.33	7,173.29	4,634,600.00	87.4	13.77
		2007	7.66	14.13	7,473.68	5,131,429.12	89.1	14.97
		2008	8.32	14.08	7,796.43	5,936,764.16	92.6	14.97
		2009	7.33	18.13	8,087.50	7,360,098.00	89.8	12.30
		2010	8.23	20.59	8,467.90	7,792,421.65	94.1	17.59
		2011	10.22	29.04	8,825.07	8,899,429.45	97.7	10.78
		2012	16.08	31.7	9,194.19	8,379,240.00	98.7	6.00
		2013	7.29	30.47	9,644.55	9,822,794.36	98.9	3.21
22	Kalimantan Selatan	2006	6.56	11.65	7,120.91	2,943,400.00	84.0	15.03
		2007	8.27	13.86	7,405.87	3,387,853.40	86.5	23.95
		2008	8.46	15.59	7,737.56	4,139,279.28	87.9	23.95

		2009	8.26	17.48	7,996.59	9,018,106.00	91.5	12.92
		2010	9.24	16.65	8,292.29	9,739,168.45	93.3	17.76
		2011	10.68	22.9	8,642.48	10,230,655.23	99.8	16.53
		2012	11.16	26.22	8,978.04	10,271,800.00	99.9	28.37
		2013	13.46	27.42	9,282.23	11,602,170.41	99.0	5.94
23	Kalimantan Timur	2006	10.55	15.71	15,521.10	3,626,800.00	89.3	10.97
		2007	11.86	17.61	16,477.17	4,223,408.60	90.6	27.66
		2008	11.88	21.28	16,877.72	5,672,278.48	92.4	27.66
		2009	11.42	24.8	17,404.87	8,792,258.00	92.0	41.72
		2010	12.33	21.88	18,747.04	9,958,671.31	94.5	35.21
		2011	14.37	29.88	20,447.80	10,259,683.06	99.3	24.57
		2012	19.08	44.29	22,147.59	10,436,160.00	94.5	36.47
		2013	12.82	44.73	22,698.16	12,321,336.48	99.4	35.78
24	Sulawesi Utara	2006	10.09	12.75	6,207.39	3,612,600.00	87.6	31.20
		2007	11.03	21.88	6,524.72	4,600,682.23	89.5	37.30
		2008	11.74	24.63	7,142.82	6,700,295.57	92.7	37.30
		2009	11.01	28.76	7,606.50	8,223,204.00	90.9	37.49
		2010	12.24	29.29	8,053.45	9,064,761.12	94.5	37.98
		2011	14.10	26.52	8,542.91	10,058,124.17	99.9	32.99
		2012	14.34	24.65	9,103.16	10,967,760.00	99.8	31.06
		2013	16.43	32.89	9,671.14	12,439,877.21	99.9	31.64
25	Gorontalo	2006	5.87	12.85	2,274.05	4,565,400.00	85.8	6.23
		2007	10.73	12.04	2,390.37	5,678,608.47	88.0	9.12
		2008	10.92	13.35	2,518.91	6,288,993.21	88.2	9.12
		2009	9.01	14.84	2,649.40	6,825,326.00	93.9	20.26

		2010	10.78	16.28	2,792.35	7,768,586.05	95.3	17.97
		2011	17.76	22.9	2,956.50	8,323,263.10	95.9	14.86
		2012	20.57	24.4	3,132.33	8,716,600.00	99.9	14.14
		2013	20.12	40.84	3,321.11	9,621,383.08	99.4	14.06
26	Sulawesi Tengah	2006	9.32	15.26	5,225.94	2,999,200.00	89.3	11.53
		2007	11.16	17.87	5,497.37	3,649,670.89	90.7	25.13
		2008	11.72	17.03	5,793.91	4,665,161.80	96.2	25.13
		2009	10.40	21.02	6,139.71	5,681,444.00	87.8	20.19
		2010	11.66	22.25	6,551.13	6,545,023.49	92.7	13.28
		2011	13.69	21.07	7,027.34	7,651,132.46	99.1	12.25
		2012	18.71	32.2	7,559.01	8,667,680.00	99.2	18.65
		2013	15.25	36.32	8,156.16	9,539,909.10	97.7	11.48
27	Sulawesi Selatan	2006	11.04	12.39	5,035.05	3,822,800.00	86.9	13.89
		2007	14.15	15.3	5,292.35	4,770,854.40	89.0	14.70
		2008	14.24	20.83	5,639.50	5,094,318.33	90.5	14.70
		2009	13.95	22.51	5,922.89	6,952,984.00	92.4	16.04
		2010	16.80	28.065	6,338.57	7,621,358.56	94.7	14.90
		2011	19.62	11.296	6,740.78	8,234,611.75	99.6	18.24
		2012	24.25	14.5748	7,225.27	10,729,880.00	99.9	26.38
		2013	23.98	14.303	7,692.69	11,677,977.01	99.1	32.71
28	Sulawesi Barat	2006	4.37	18.67	3,166.01	2,950,400.00	85.5	13.29
		2007	7.00	12.72	3,311.81	2,844,362.12	87.7	28.34
		2008	7.13	12.34	3,614.63	5,396,750.11	90.5	28.34
		2009	6.03	16.58	3,733.15	6,839,924.00	89.0	15.45
		2010	7.40	17.25	4,073.30	7,540,332.22	95.1	14.72

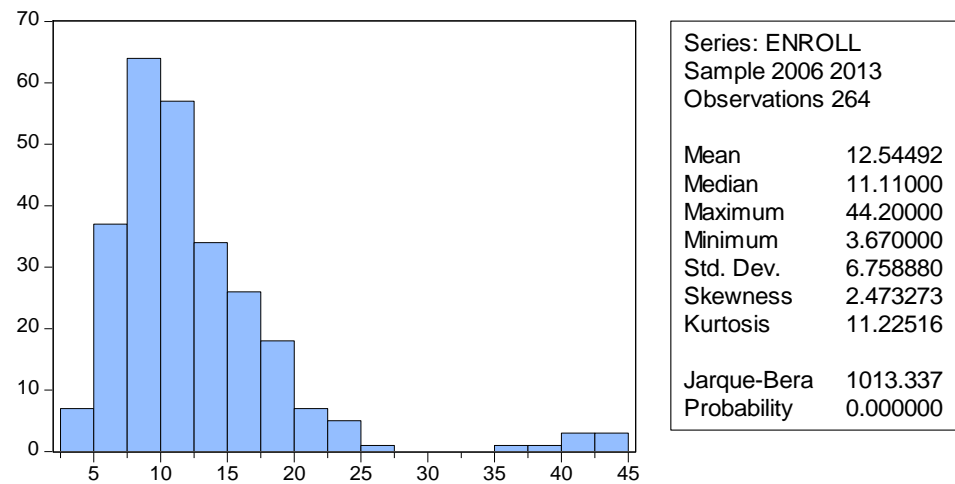
		2011	9.96	29.09	4,406.87	8,280,792.84	99.7	14.47
		2012	13.35	28.33	4,711.52	9,681,180.00	99.8	10.83
		2013	11.06	24.26	4,952.51	10,636,783.49	98.6	26.90
29	Sulawesi Tenggara	2006	11.72	8.38	4,180.17	2,206,200.00	91.1	11.39
		2007	13.17	16.71	4,420.10	2,588,291.78	92.3	26.28
		2008	13.16	18.22	4,645.50	4,340,316.84	95.3	26.28
		2009	13.53	21.75	4,896.24	5,584,926.00	92.5	27.51
		2010	15.36	14.225	5,194.32	5,920,866.52	93.9	27.44
		2011	18.56	15.897	5,534.42	6,489,411.99	99.4	28.74
		2012	18.94	18.35	5,977.64	7,628,980.00	99.6	35.65
		2013	16.88	14.497	6,275.62	8,330,010.60	98.3	19.53
30	Maluku	2006	9.67	11.72	2,478.45	3,224,600.00	88.1	37.61
		2007	11.51	11.63	2,549.04	3,603,812.96	89.6	22.15
		2008	11.94	17.52	2,584.58	4,336,828.52	95.2	22.15
		2009	13.05	17.82	2,651.26	5,878,872.00	88.6	29.19
		2010	15.69	14.64	2,748.39	6,640,419.09	90.3	30.24
		2011	20.53	23.95	2,861.72	7,435,242.58	99.4	27.70
		2012	25.35	26.32	3,029.70	8,876,720.00	99.4	15.21
		2013	21.10	31.63	3,128.99	10,069,339.27	97.8	12.72
31	Maluku Utara	2006	10.02	9.6	2,490.75	3,011,800.00	72.3	19.75
		2007	11.34	16.92	2,576.14	4,888,517.40	76.3	29.22
		2008	12.22	19.33	2,664.97	5,703,967.90	89.8	29.22
		2009	11.29	23.42	2,759.06	6,672,612.00	75.7	31.99
		2010	12.66	24.23	2,909.56	7,221,367.61	78.3	23.44
		2011	14.95	45.22	3,026.62	8,111,964.44	99.1	29.12

		2012	19.57	54.88	3,157.90	9,110,100.00	98.9	12.52
		2013	15.23	34.63	3,279.50	9,890,470.98	99.6	12.50
32	Papua	2006	5.22	10.95	7,939.17	2,553,400.00	82.0	17.33
		2007	7.60	13.23	7,858.02	3,576,151.60	84.5	9.85
		2008	7.40	14.42	7,351.60	4,473,765.66	88.9	9.85
		2009	4.17	15.26	8,525.91	6,642,004.00	86.6	12.76
		2010	4.90	14.43	7,840.49	7,579,991.60	90.2	25.13
		2011	4.54	21.89	7,274.75	8,031,647.87	97.8	22.57
		2012	8.17	19.81	7,208.25	12,112,860.00	99.5	29.91
		2013	9.00	50.15	8,117.64	13,366,590.61	97.2	15.12
33	Papua Barat	2006	4.03	15.44	6,350.50	2,656,000.00	85.2	13.64
		2007	5.63	16.2	6,648.32	2,852,724.58	87.3	13.66
		2008	7.20	18.69	7,003.30	3,719,712.90	90.9	13.66
		2009	5.22	24.5	7,373.10	5,245,846.00	90.3	16.86
		2010	7.16	25.62	7,723.79	5,648,726.97	91.2	15.36
		2011	8.94	32.72	8,280.36	6,494,341.40	97.7	19.87
		2012	13.00	34.97	8,668.87	8,065,700.00	99.9	15.20
		2013	13.14	37.01	9,106.88	9,484,064.16	98.8	29.96

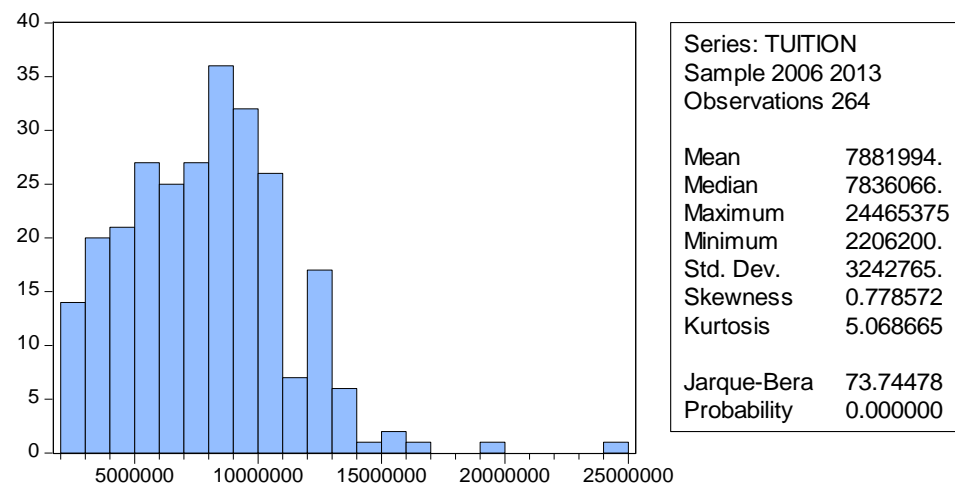
Lampiran 2

Statistik Deskriptif Data Penelitian

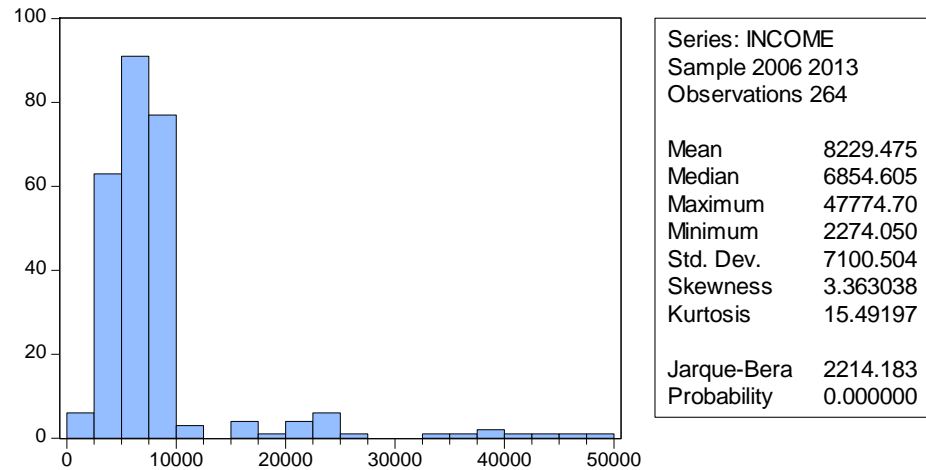
a. Statistik Deskriptif Permintaan Pendidikan Tinggi (Enroll)



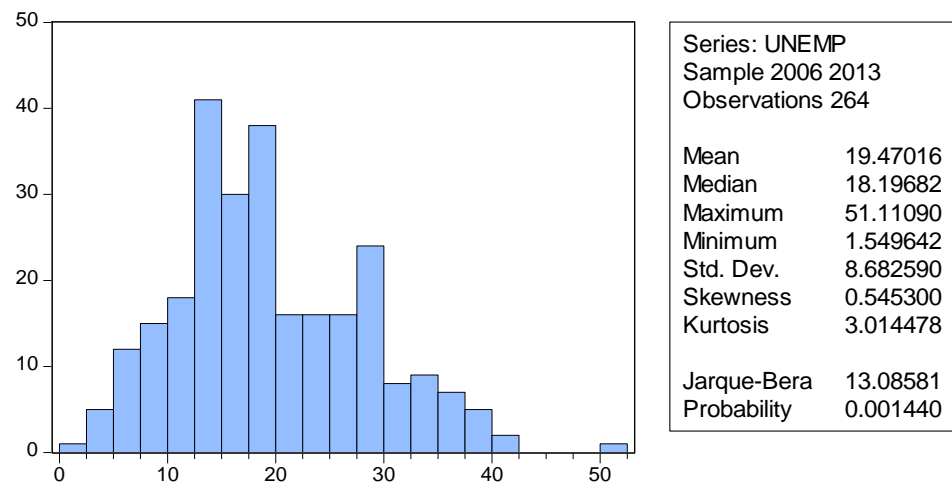
b. Statistik Deskriptif Biaya Pendidikan (Tuition)



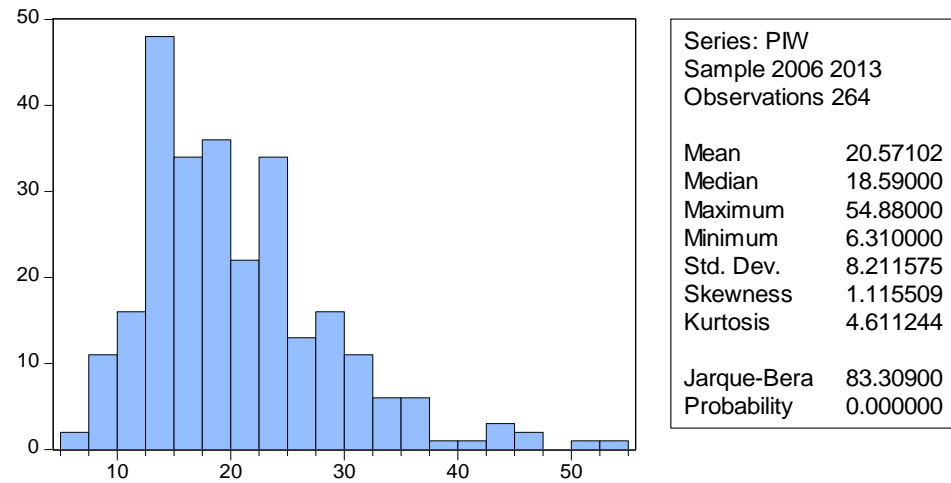
c. Statistik Deskriptif Pendapatan Masyarakat (Income)



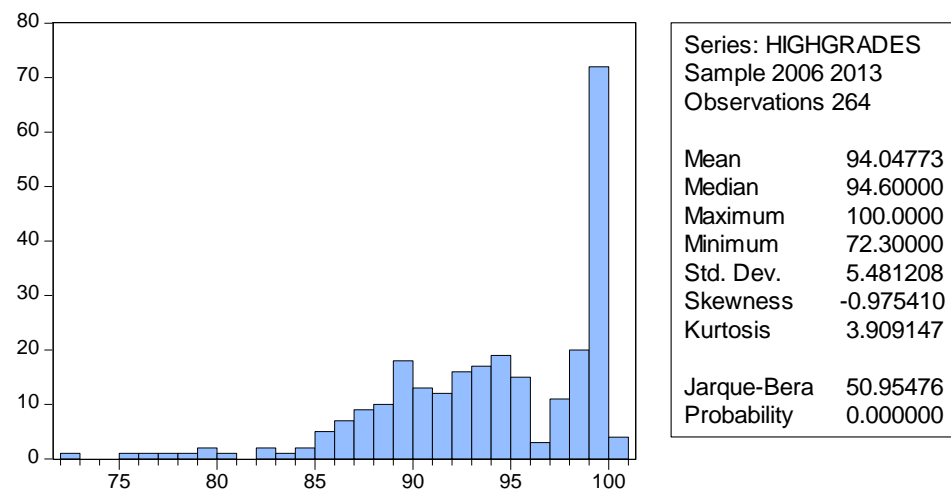
d. Statistik Deskriptif Tingkat Pengangguran (Unemp)



e. Statistik Deskriptif Pekerja Tingkat Universitas (PIW)



f. Statistik Deskriptif Tingkat Lulusan Sekolah Menengah (HighGrades)



Lampiran 3

Uji Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	62.936711	(32,217)	0.0000
Cross-section Chi-square	594.225615	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ENROLL
Method: Panel Least Squares
Date: 06/13/15 Time: 17:32
Sample: 2006 2013
Periods included: 8
Cross-sections included: 33
Total panel (unbalanced) observations: 255

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(TUITION)	-0.579229	1.338193	-0.432844	0.6655
LOG(INCOME)	-1.471123	0.703873	-2.090042	0.0376
UNEMP	2.514261	0.900411	2.792348	0.0056
PIW	0.226315	0.051707	4.376855	0.0000
HIGHGRADES	0.285524	0.104464	2.733223	0.0067
C	2.038744	15.23805	0.133793	0.8937
R-squared	0.209433	Mean dependent var		12.28780
Adjusted R-squared	0.193558	S.D. dependent var		6.281543
S.E. of regression	5.640959	Akaike info criterion		6.321234
Sum squared resid	7923.285	Schwarz criterion		6.404557
Log likelihood	-799.9573	Hannan-Quinn criter.		6.354750
F-statistic	13.19273	Durbin-Watson stat		0.222767
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: SEMILOG2

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	52.434282	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(TUITIONFEES)	-0.935202	0.984625	0.089583	0.0000
LINCOME	16.070328	5.604335	2.774325	0.0000
LOG(UNIVUNEMP)	-0.269285	-0.430653	0.003403	0.0057
LPIW	2.803951	2.893927	0.116030	0.7917
HIGHGRADES	0.074102	0.122791	0.000065	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ENROLL

Method: Panel Least Squares

Date: 04/07/15 Time: 07:44

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-147.1529	13.42361	-10.96224	0.0000
LOG(TUITION)	-0.935202	0.682148	-1.370967	0.1717
LOG(INCOME)	16.07033	2.290322	7.016624	0.0000
LOG(UNEMP)	-0.269285	0.234921	-1.146281	0.2529
LOG(PIW)	2.803951	0.670879	4.179518	0.0000
HIGHGRADES	0.074102	0.039330	1.884100	0.0608

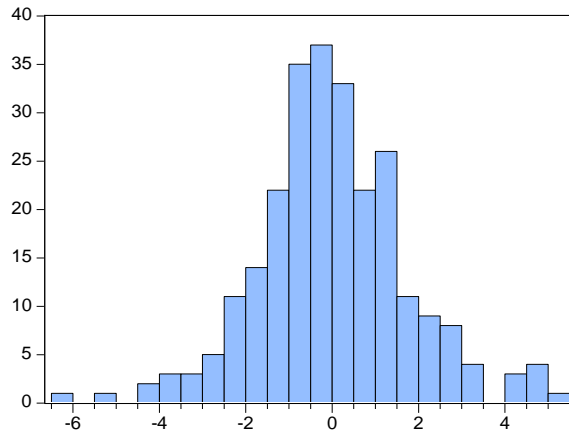
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.942776	Mean dependent var	16.00235
Adjusted R-squared	0.933407	S.D. dependent var	6.880428
S.E. of regression	1.775531	Akaike info criterion	4.118541
Sum squared resid	712.4677	Schwarz criterion	4.633261
Log likelihood	-505.6475	Hannan-Quinn criter.	4.325371
F-statistic	100.6321	Durbin-Watson stat	1.140660
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5

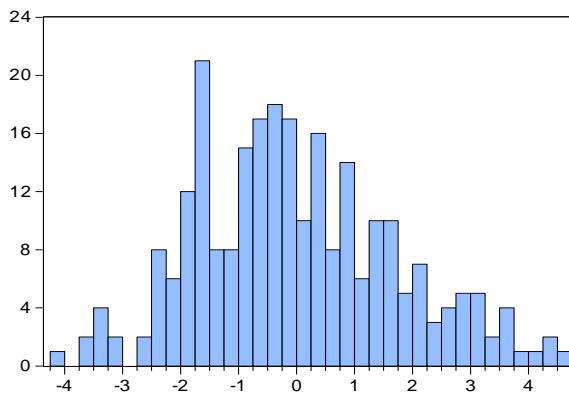
Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample 2006 2013	
Observations 255	
Mean	8.88e-17
Median	-0.159465
Maximum	5.421198
Minimum	-6.179772
Std. Dev.	1.741880
Skewness	0.101337
Kurtosis	4.200252
Jarque-Bera	15.74288
Probability	0.000381

Lampiran 6

Uji Normalitas EGLS



Series: Standardized Residuals	
Sample 2006 2013	
Observations 255	
Mean	7.31e-17
Median	-0.191490
Maximum	4.540239
Minimum	-4.206270
Std. Dev.	1.725967
Skewness	0.350593
Kurtosis	2.795106
Jarque-Bera	5.669955
Probability	0.058720

Lampiran 7

Korelasi Bivariat

	HIGH GRADES	LOG (INCOME)	PIW	UNEMP	LOG (TUITION)
HIGHGRADES	1	-	-	-	-
LOG(INCOME)	0.247	1	-	-	-
PIW	0.49	0.17	1	-	-
UNEMP	-0.01	-0.02	-0.02	1	-
LOG(TUITION)	0.69	0.48	0.46	-0.04	1

Lampiran 8

Hasil Uji Park

Dependent Variable: LOG(RESIDUAL^2)

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 06/13/15 Time: 10:49

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 32

Total panel (unbalanced) observations: 255

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(TUITION)	-0.377366	0.620487	-0.608177	0.5437
UNEMP	0.328661	0.376369	0.873240	0.3835
PIW	-0.031865	0.026789	-1.189463	0.2356
LOG(INCOME)	-0.484871	2.087980	-0.232220	0.8166
HIGH	0.032384	0.042215	0.767105	0.4439
C	7.308301	13.18763	0.554179	0.5800

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.150116	Mean dependent var	-0.416893
Adjusted R-squared	0.005796	S.D. dependent var	2.336665
S.E. of regression	2.313856	Sum squared resid	1135.033
F-statistic	1.040158	Durbin-Watson stat	2.090904
Prob(F-statistic)	0.414832		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.104578	Mean dependent var	-0.408218
Sum squared resid	1140.501	Durbin-Watson stat	2.183297

Lampiran 9

Hasil Regresi Utama

Dependent Variable: ENROLL
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/13/15 Time: 17:37
 Sample: 2006 2013
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 33
 Total panel (unbalanced) observations: 255

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(TUITION)	-0.149826	0.702661	-0.213227	0.8314
LOG(INCOME)	12.06926	2.374375	5.083132	0.0000
UNEMP	1.580370	0.368184	4.292333	0.0000
PIW	0.034019	0.025040	1.358582	0.1757
HIGHGRADES	0.153199	0.043226	3.544152	0.0005
C	-107.2375	14.65678	-7.316579	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.923104	Mean dependent var	12.28780
Adjusted R-squared	0.909993	S.D. dependent var	6.281543
S.E. of regression	1.884540	Akaike info criterion	4.241917
Sum squared resid	770.6734	Schwarz criterion	4.769635
Log likelihood	-502.8445	Hannan-Quinn criter.	4.454188
F-statistic	70.40518	Durbin-Watson stat	1.699627
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Regresi Utama EGLS

Dependent Variable: ENROLL
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 06/13/15 Time: 19:14
 Sample: 2006 2013
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 33
 Total panel (unbalanced) observations: 255
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(TUITION)	-0.151604	0.543245	-0.279072	0.7805
LOG(INCOME)	11.57127	1.804476	6.412539	0.0000
UNEMP	1.784235	0.310200	5.751878	0.0000
PIW	0.039905	0.021569	1.850122	0.0657
HIGHGRADES	0.119361	0.033999	3.510692	0.0005
C	-99.82922	10.90125	-9.157598	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.917354	Mean dependent var	14.62015
Adjusted R-squared	0.903263	S.D. dependent var	7.961403
S.E. of regression	1.867323	Sum squared resid	756.6562
F-statistic	65.09921	Durbin-Watson stat	1.837929
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.922232	Mean dependent var	12.28780
Sum squared resid	779.4133	Durbin-Watson stat	1.662673